

**STRATEGI REHABILITASI WANITA TUNA SUSILA
DI KABUPATEN MALANG**

(STUDI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MALANG DAN LOKALISASI
KEBOBANG WONOSARI MALANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

REZA SEPTIANTO
NIM. 0710310085



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2011

MOTTO

والعصر ، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق

"Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi, kecuali mereka yang beriman, beramal shalih, nasihat-menasihati dalam kebenaran dan nasihat-menasihati dalam kesabaran." (Al-'Ashr)

HIDUP TERLALU SINGKAT UNTUK MELAKUKAN SESUATU YANG TAK BERARTI



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Strategi Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di
Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Sosial
Kabupaten Malang dan Lokalisasi Kebobang
Malang)

Disusun Oleh : REZA SEPTIANTO

NIM : 0710310085

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik



PEMBIMBING I

Malang, Juli 2011

PEMBIMBING II

Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si
NIP. 19610202 1985031006

Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 1 003



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Skripsi atas nama : Reza Septianto

Judul : Strategi Rehabilitasi Wanita Tuna Susila
di Kabupaten Malang

Dan dinyatakan lulus

Majelis Penguji

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si
NIP. 19610202 1985031006

Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 1987031003

Ketua

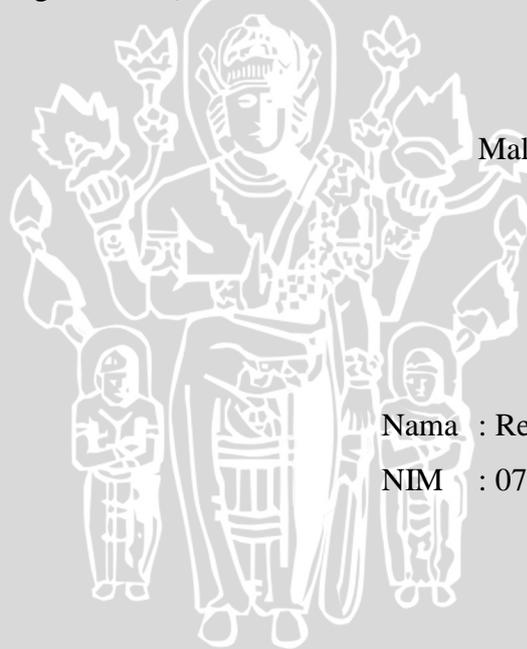
Anggota

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, Juli 2011



Nama : Reza Septianto

NIM : 0710310085

RINGKASAN

Septianto, Reza, 2011, **Strategi Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Lokalisasi Kebobang Wonosari Malang)**, Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si, Dr. Suryadi, MS. 120 hal+ xvi

Masalah sosial tentang prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Di satu sisi prostitusi merupakan suatu hal yang haram, tetapi sebagian orang mempunyai pendapat bahwa prostitusi merupakan suatu kebutuhan. Pada tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Malang telah mengeluarkan Instruksi Bupati tentang pelarangan kegiatan prostitusi di wilayah Kabupaten Malang tetapi keadaan riil di lapangan ada lima lokalisasi yang sampai sekarang masih menyediakan jasa. Maka dari itu perlu adanya suatu strategi yaitu rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Daerah Kumuh Dinas Sosial Kabupaten Malang, Kepala Desa Kebobang Kecamatan Wonosari, Ketua Pokja Lokalisasi Kebobang, dan Pendamping Lapangan Lembaga Paramitra. Wawancara dan observasi juga dilakukan dengan Wanita Tuna Susila peserta program pembinaan sosial di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang. Selain itu juga dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang.

Dalam analisis pembahasan tulisan ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat, dimana dalam teori tersebut dijelaskan bagaimana cara-cara penerapan strategi yang berdampak signifikan kepada para Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang. Teori-teori tersebut adalah teori model-model pemberdayaan masyarakat, tahap-tahap pemberdayaan masyarakat dan mekanisme pemberdayaan masyarakat.

Strategi Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang menekankan tiga fokus yaitu: Pembinaan mental, pembinaan keterampilan dan pemberian bantuan modal. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor pendukung adalah koordinasi sektoral yang baik dalam internal pemerintah baik dalam tataran propinsi, kabupaten, kecamatan sampai birokrat desa, adanya peran aktif dari Lembaga Swadaya Masyarakat, respon positif dan semangat dari para Wanita Tuna Susila untuk ingin berubah. Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam program rehabilitasi Wanita Tuna Susila adalah: Minimnya alokasi dana dari pemerintah, belum adanya panti rehabilitasi bagi Wanita Tuna Susila dan ex. Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang, kurang maksimalnya koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, belum ada koordinasi yang baik dengan koperasi atau sektor swasta khususnya dalam hal pemodalan dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Pemberdayaan, Wanita Tuna Susila, Kesejahteraan

SUMMARY

Septianto, Reza, 2011. **The Prostitute Women Rehabilitation Strategy in Malang Regency (A Study on the Social Official of Malang Regency and Kebobang Prostitute Complex at Wonosari, Malang)**. Supervisor: Abdul Hakim. Co-supervisor: Suryadi. 120 pages + xvi.

Social problem of prostitution is a very confused one. People agree in one hand that prostitution is prohibited, but some say in other hand that it is a demand of life. In 2002, the Government of Malang Regency released Regent's Instruction to prohibit any prostitution activities in Malang Regency. However, there are five prostitution complexes still served. Therefore, a strategy is needed to deal with this issue, among other by the rehabilitation of prostitute women in Malang Regency.

Research method is qualitative. Data collection techniques are interview, observation, and documentation. Interview is conducted with the Head of Social Rehabilitation Division of Social Official of Malang Regency, the Head of Vile and Anti-Social Regions Section of Social Rehabilitation Division of Social Official of Malang Regency, the Head of Kebobang Village at Wonosari Subdistrict, The Chair of Work Group of Kebobang Prostitution Complex, and The Field Counselor of Paramitra Regency. Documents related to the rehabilitation of prostitute women in Malang Regency are collected.

In this paper discussion of analysis using the theory community empowerment, which in theory is explained how the means of enforcement strategies that a significant impact on the prostitute in Localization Kebobang. These theories are of community empowerment models, the stages of community development and community empowerment mechanisms

Rehabilitation Strategies for Women prostitute in Localization Kebobang emphasizes three focus are: morality training skill training and capital assistance. In the implementation of rehabilitation program there are several factors supporting and inhibiting. There are supporting and constraining factors to the rehabilitation program. The supporting factors are: good sector-based coordination by the government in the level of provincial, district, subdistrict, and village bureaucrats; the favorable role of non-government organization (NGO); and positive response by the prostitute women. The constraining factors include limited fund of the government, the absence of rehabilitation house for the prostitute women and ex-prostitute, less coordination with NGO, and lack of coordination with cooperative or private in matters of capital and employment supplies.

Keywords: Rehabilitation, Empowerment, Prostitute Women, Welfare

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Strategi Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Lokalisasi Kebobang Malang).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak. Prof. Dr. Sumartono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak. Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak. Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dukungan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak. Dr. Suryadi, MS selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, bantuan, saran dan kritik dengan sabar tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu. Dra. Hj. Anny Prihantari selaku Kepala Dinas Kabupaten Malang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Malang.
6. Ibu. Dra. Sri Pawening, M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi.

7. Ibu Dra. Ratna Wahyuniati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Daerah Kumuh, Dinas Sosial Kabupaten Malang yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam penyelesaian skripsi.
8. Pak Bagong, Ketua Pokja Lokalisasi Kebobang yang telah memberikan izin sekaligus membantu untuk melakukan penelitian di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang.
9. Ibu Mujiati M,Si, Kepala Desa Kebobang yang memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi.
10. Bapak Prawoto Sudarwanto, S.Pd.I dan Ibu Sumarningasih S.Pd dan Merry Yuanita Septianing selaku keluarga yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
11. Nio Anggun yang telah memberikan semangat khusus dalam penyelesaian skripsi.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moral maupun material.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Strategi	11
1. Pengertian Strategi	11
2. Jenis-jenis Strategi	17
3. Pemilihan Strategi	19
4. Manfaat Strategi	20
5. Rehabilitasi.....	21
B. Pemberdayaan Masyarakat.....	23
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	23
2. Kendala dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	26
3. Model-model Pemberdayaan Masyarakat.....	27

3. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat.....	31
4. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat.....	33
C. Prostitusi.....	34
1. Pengertian Prostitusi	34
2. Akibat Kegiatan Prostitusi	35
3. Wanita Tuna Susila	36
4. Penyebab Munculnya Wanita Tuna Susila	37
5. Ciri-ciri Wanita Tuna Susila	39
E. Lokalisasi.....	40
1. Pengertian Lokalisasi	40
2. Keberadaan Lokalisasi	41
3. Institusi Pemerintah yang Berhubungan dengan Lokalisasi	42
F. Kesejahteraan Sosial	43
1. Pengertian Kesejahteraan Sosial	43
2. Fungsi Kesejahteraan Sosial	45
3. Kriteria Usaha Kesejahteraan Sosial.....	47
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Fokus Penelitian.....	52
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	53
D. Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Instrumen Penelitian.....	56
G. Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Hasil Penelitian.....	60
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang.....	60
a. Letak Geografis Kabupaten Malang.....	60
b. Luas Wilayah.....	61



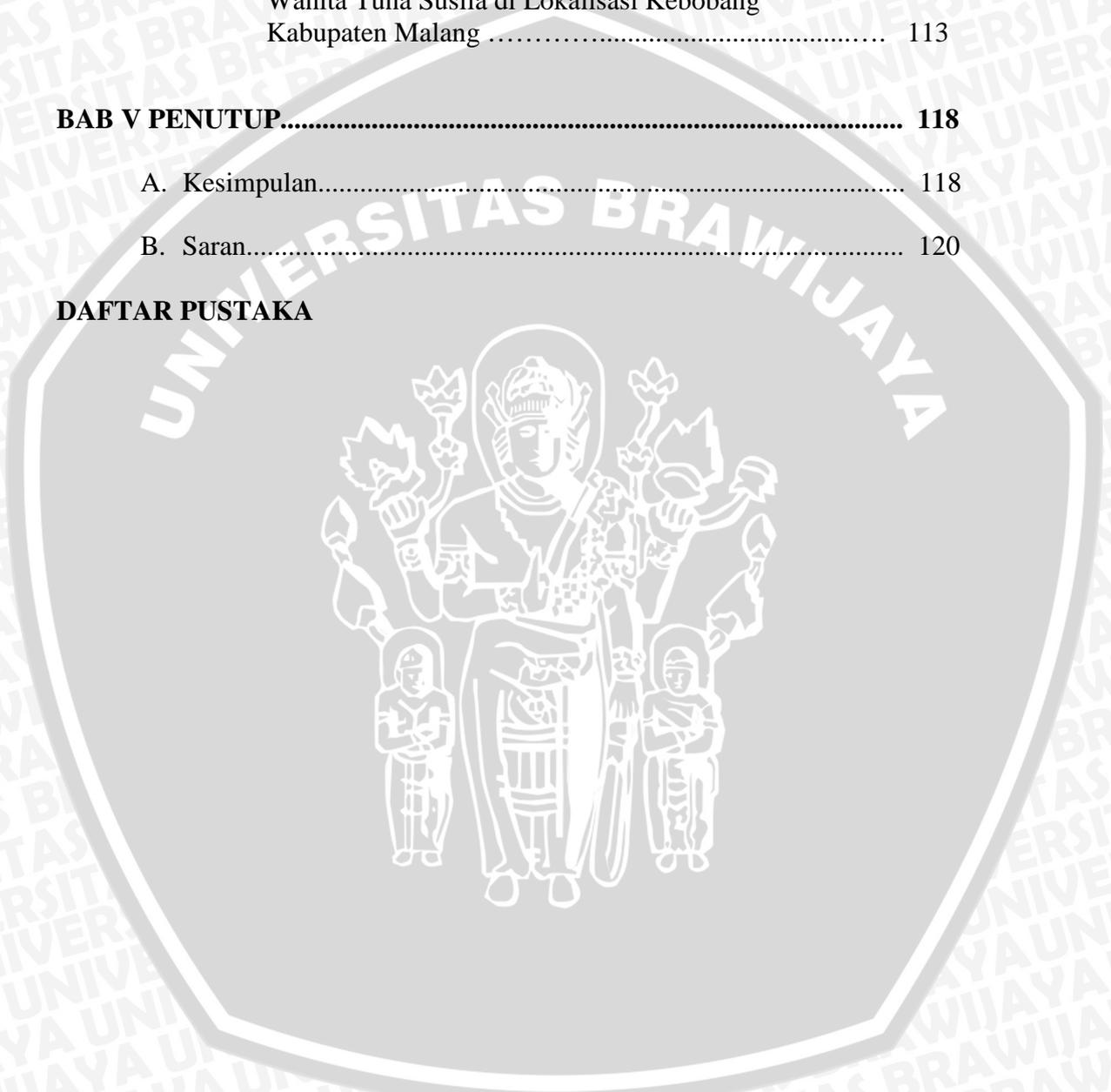
c. Penduduk.....	62
d. Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan.....	63
2. Gambaran Umum Desa Kebobang.....	65
a. Luas Wilayah.....	65
b. Penduduk.....	66
c. Lokalisasi Kebobang.....	68
3. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Malang.....	72
a. Visi dan Misi Dinas Sosial.....	72
b. Tujuan Dinas Sosial.....	74
c. Sasaran Dinas Sosial.....	74
d. Tugas Dinas Sosial.....	75
e. Fungsi Dinas Sosial.....	75
f. Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial	76
4. Gambaran Kehidupan Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang.....	79
a. Daerah asal dan umur Wanita Tuna Susila.....	79
b. Tingkat Pendidikan.....	80
c. Penyebab terjun ke dunia prostitusi.....	81
5. Strategi Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang.....	83
a. Strategi Rehabilitasi Wanita Tuna susila di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang.....	88
b. Faktor – faktor Pendukung Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang.....	91
c. Faktor – faktor Penghambat Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang.....	95
6. Dampak Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang.....	97
a. Peningkatan Pengetahuan.....	98
b. Peningkatan Keterampilan dan bantuan modal.....	98
B. Pembahasan.....	100
1. Strategi Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang.....	102

2. Faktor–Faktor Pendukung Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang.....	108
3. Faktor–Faktor Penghambat Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang	113

BAB V PENUTUP..... 118

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

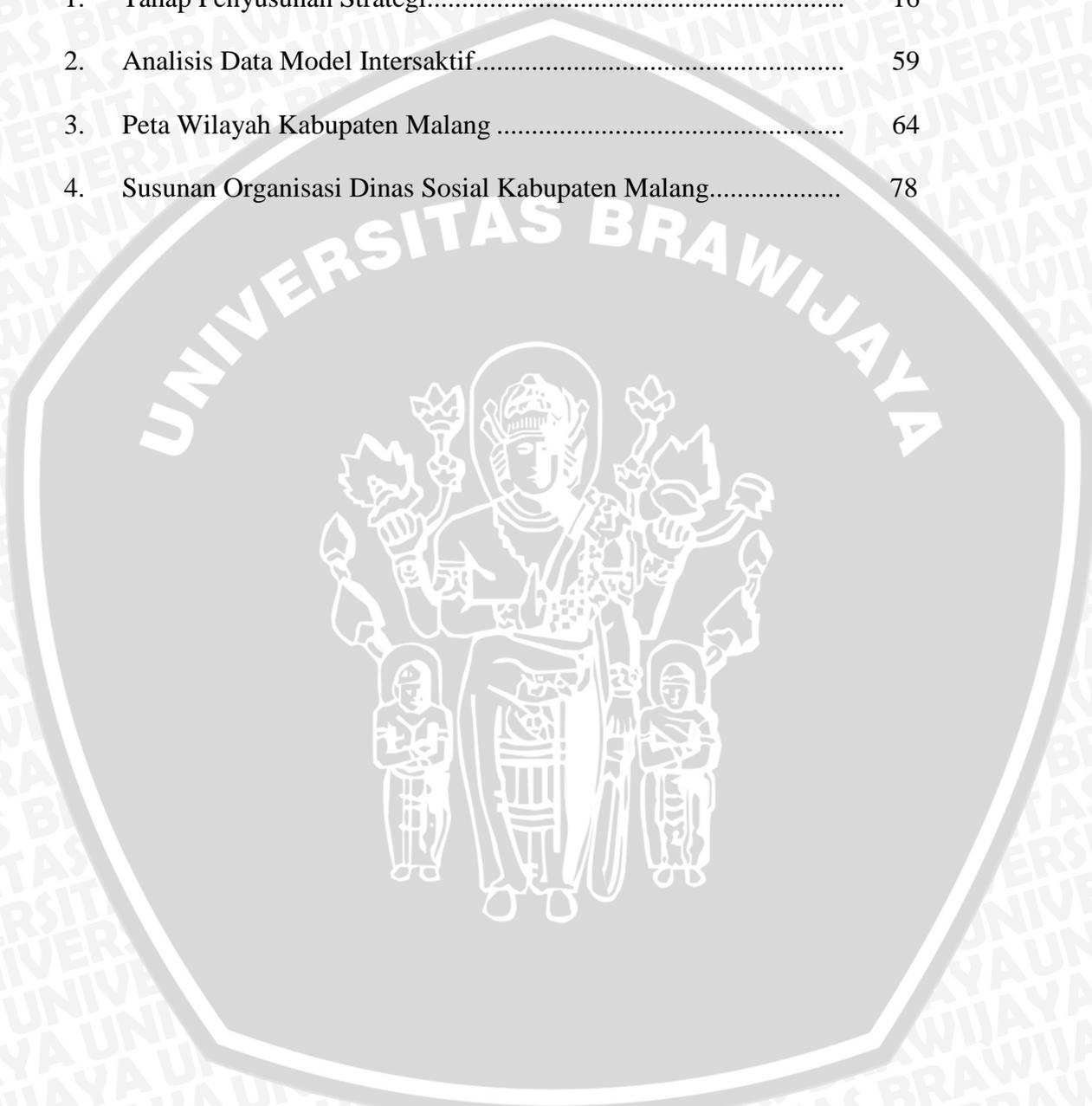


DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Daftar Lokalisasi-lokalisasi di Kabupaten Malang	5
2.	Perincian Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2007-2009.....	61
3.	Jumlah Penduduk di Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2007-2009	62
4.	Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan	63
5.	Perincian Wilayah Desa Kebobang Tahun 2010.....	66
6.	Jumlah Penduduk Desa Kebobang Tahun 2010.....	66
7.	Perincian Mata Pencaharian Warga Desa Kebobang Tahun 2010	67
8.	Jumlah Wisma dan Asal Pekerja Seks di Lokalisasi Kebobang Tahun 2011	69

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Tahap Penyusunan Strategi.....	16
2.	Analisis Data Model Intersaktif.....	59
3.	Peta Wilayah Kabupaten Malang	64
4.	Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Malang.....	78



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|--|
| 1. | Instruksi Bupati Malang Nomor 3 tahun 2002 |
| 2. | Foto Kegiatan |
| 3. | Surat Pengantar Penelitian |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah besar di banyak negara, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat (AS). Tercatat 15 juta tenaga kerja atau sekitar 8 % lebih menganggur. Untuk negara Indonesia Pemerintah selama ini selalu memfokuskan program pembangunannya pada penanganan kedua masalah ini. Hasilnya belum sepenuhnya memuaskan tetapi indikator-indikator sosial yang ada telah menunjukkan perbaikan dalam pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia pada Juni 2010 sebesar 234,2 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,33 % per tahun. Dari jumlah itu, jumlah angkatan kerja kini mencapai 116 juta orang. Sebanyak 107,41 juta orang adalah penduduk yang bekerja. Sedangkan jumlah penganggur sebanyak 8,59 juta orang atau penganggur terbuka sebesar 7,41 %.

Tingkah laku individu pada umumnya didasari adanya motivasi untuk memenuhi segala kebutuhan. Apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan masalah bagi individu maupun lingkungannya. Seseorang yang kesulitan dalam pencapaian kebutuhan pokok akan terdorong untuk melakukan tindakan yang bersifat menyimpang, seperti perjudian, pencurian, pelacuran, serta berbagai bentuk kriminalitas lainnya. Keadaan ekonomi yang tidak stabil menyulitkan kehidupan masyarakat, terutama kaum perempuan, banyak dari mereka yang terjun dalam kegiatan prostitusi.

Prostitusi berkembang karena tercipta mekanisme pasar yang menjadikan pelacuran sebagai suatu bisnis seks yang sangat menguntungkan. Menurut Syam (2010:8), siapapun tidak akan mengingkari bahwa dunia prostitusi atau pelacuran bukanlah pilihan utama dalam bahtera kehidupan sosial manusia. Tidak ada seorang pun yang memiliki cita – cita sebagai seorang pelacur.

Menurut kamus Bahasa Indonesia karya Poerdaminto (1983:351), disebutkan bahwa pelacuran adalah perihal menjual diri sedangkan pelacur berarti wanita tuna susila. Jadi pelacuran menunjukkan para pembuatnya sedangkan pelacur menunjukkan pada orang yang melakukannya. KUHP tidak memberikan definisi mengenai pelacuran. Menurut W. A. Bonger dan B. Basu menyatakan bahwa pelacuran ialah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan- perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya.

Prostitusi akan senantiasa hadir selama ada orang yang membutuhkan. Prostitusi merupakan bagian dari institusi sosial yang akan tetap ada dan bahkan berkembang selama masih dibutuhkan. Menurut Syam (2008:24), dunia pelacuran atau prostitusi akan memiliki usia setua manusia itu sendiri dan akan berhenti manakala dunia ini berhenti. Di lain sisi norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi, bahkan terdapat UU tentang praktek prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis dalam KUHP yaitu mereka menyediakan sarana tempat prostitusi (pasal 296 KUHP), mereka yang mencarikan pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki di bawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP). Dari segi kesehatan, juga menunjukkan bahaya

penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat.

Dalam Islam, prostitusi merupakan hal yang melanggar norma-norma Agama, karena dalam prostitusi perzinaan dianggap sebagai hal yang wajar dan dikomersilkan. Menurut Qs. An-Nur: 2 dinyatakan bahwa *perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, dan pada hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman*. Walaupun demikian, perbuatan zina masih tetap ada, bahkan terorganisir secara profesional, tempat-tempat melakukan zina di sediakan, di lindungi oleh hukum dan mungkin mendapat fasilitas-fasilitas tertentu.

Bisnis prostitusi banyak menimbulkan dilema, tidak jarang pemerintah daerah juga memiliki kepentingan terhadap eksistensi lokalisasi karena berbagai alasan, seperti meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, maupun sebagai pelancar kegiatan bisnis (Winarni, 2008:3). Menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Tahun 2009, populasi WTS pada tahun 2008 di seluruh Indonesia berjumlah 63.661 orang. Permasalahan sosial WTS semakin meningkat baik dari penyebab maupun dampak yang ditimbulkannya. Keberadaan WTS di Indonesia yang dulu hanya di kota-kota besar sekarang sudah merambah ke kota-kota kecil, bahkan mulai beroperasi di daerah-daerah perbatasan kota dan provinsi, keadaan ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan. Profesi yang erat kaitannya dengan dunia pelacuran ini merupakan masalah yang sangat

kompleks karena tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi, namun juga kultur, pengaruh gaya hidup, serta nilai dan norma masyarakatnya. Pilihan menjadi WTS sebenarnya ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah karena tekanan ekonomi. Berdasarkan penelitian Koch, sebagaimana diungkapkan oleh Suparlan (1994), perempuan adalah komoditi dan ketika akses ekonomi tidak dia dapatkan maka jalan pintas yang dapat dilakukan adalah menjual dirinya sendiri (menjadikan dirinya sebagai pelacur).

Menurut Sulistyianingsih (1993:25) industri seks dikelompokkan menjadi dua, pertama industri seks yang terorganisir dan kedua industri seks yang tidak terorganisir. Industri seks yang terorganisir misalnya panti pijat, rumah bordil, klub malam, diskotik dan sebagainya yang disediakan bagi pelanggan-pelanggannya. Sedangkan industri seks yang tidak terorganisir dapat ditemukan pada beberapa kelompok wanita panggilan maupun wanita yang menjajakan diri di jalanan dari pasaran kelas menengah sampai kelas bawah.

Sebuah kota dapat disebut sebagai metropolis jika di dalamnya tidak hanya terdapat kehidupan perdagangan, pendidikan, industri tetapi juga sarat dengan kehidupan malam, perjudian dan pelacuran. Di kabupaten Malang banyaknya fenomena prostitusi ini tidak hanya berkembang di sudut-sudut kota, tetapi sudah merambah pada kecamatan bahkan ke desa desa. Sebagai Kabupaten terbesar di Jawa Timur Kabupaten Malang menjadi tujuan bagi para wanita tuna susila dari luar daerah untuk mendapatkan uang di beberapa lokalisasi yang ada. Tempat-tempat lokalisasi di kabupaten Malang diantaranya dijelaskan dalam tabel 1.

Tabel 1

Daftar lokalisasi-lokalisasi di Kabupaten Malang

No	Lokasi	Kecamatan	Jumlah WTS Penduduk Kab. Malang	Jumlah WTS Penduduk luar Kab. Malang
1	Suko	Sumber Pucung	50	62
2	Slorok	Kromengan	35	27
3	Kebobang	Wonosari	28	38
4	Kalikudu	Pujon	16	9
5	Gondanglegi	Gondanglegi	43	27
Jumlah			172	163
Total			335 Orang	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Malang

Para WTS tersebut oleh Dinas Sosial dikelompokkan ke dalam kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), bersama-sama dengan anak-anak terlantar, pengemis, gelandangan yang nasibnya kurang beruntung baik secara sosial maupun ekonomi.

Pada tahun 2002 Bupati kabupaten Malang mengeluarkan Instruksi No.3 Tahun 2002 Tentang Larangan Operasional Bagi Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Kabupaten Malang. Tetapi kenyataannya Perda Anti Maksiat tersebut tidak mengikat secara tegas dan pemerintah tidak mampu memberantas tuntas dunia prostitusi. Hal ini disebabkan karena dunia prostitusi memiliki logikanya sendiri, selama ada pelanggan yang membutuhkan terpenuhinya kebutuhan seksual maka selama itu pula seks bebas akan tetap ada.

Logika semacam itu tidak dapat di atasi hanya dengan memberangus para pelacur,mucikari dan pelanggan tetapi harus dilakukan pemberantasan secara sistemik dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Melihat kompleksitas tersebut Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai cara khusus dalam penanggulangan prostitusi. Salah satu upaya untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu melakukan upaya rehabilitasi terhadap para WTS melalui lembaga-lembaga sosial yang ada. Para WTS membutuhkan penanganan agar nanti dapat kembali diterima oleh masyarakat. Selain berbagai pendidikan dan ketrampilan, mereka juga mendapatkan pembinaan moral agar mereka dapat bersikap dan berperilaku baik, tidak hanya memahami norma-norma yang ada dalam masyarakat, tetapi juga pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya rehabilitasi sosial merupakan bentuk dari pada pemberdayaan. Suharto (2005:59) menyimpulkan pemberdayaan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Prostitusi harus ditanggulangi karena akibat-akibat yang membahayakan seperti munculnya berbagai macam penyakit kelamin yang menular, khususnya HIV/AIDS, serta menimbulkan kondisi yang buruk bagi warga di sekitar lokasi prostitusi. Dan yang terpenting adalah agar gejala ini tidak diterima oleh masyarakat sebagai pola budaya. Tetapi pemerintah berada dalam posisi ambivalen. Pelacuran dimusuhi karena dianggap sebagai tindakan penyelewengan seksual dan perdagangan manusia tetapi di sisi lain dibutuhkan sebagai sarana untuk menambah devisa daerah. Melihat fenomena yang menarik tersebut maka penulis mencoba melakukan penelitian tentang **“Strategi Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Lokalisasi Kebobang Wonosari Malang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran kehidupan Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Wonosari Kabupaten Malang?
2. Bagaimanakah strategi rehabilitasi Wanita Tuna Susila oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang di Lokalisasi Kebobang Wonosari Kabupaten Malang?
3. Bagaimanakah dampak rehabilitasi bagi para Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Wonosari Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki suatu tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis antara lain yaitu:

1. Mendeskripsikan gambaran kehidupan Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Wonosari Kabupaten Malang.
2. Mengetahui dan menganalisis strategi rehabilitasi Wanita Tuna Susila oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang di Lokalisasi Kebobang Wonosari Kabupaten Malang
3. Mengetahui dampak rehabilitasi bagi para Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Wonosari Kabupaten Malang

D. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah kepustakaan dan dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis.
2. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang rehabilitasi Wanita Tuna Susila yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Memberikan informasi yang bermanfaat, yang dapat dijadikan acuan bagi pembinaan, terutama dalam menangani permasalahan sosial terutama masalah Wanita Tuna Susila di daerahnya

2) Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai rehabilitasi Wanita Tuna Susila

3) Bagi Masyarakat

Dapat menginformasikan hasil-hasil penelitian ini kepada masyarakat luas sehingga para Wanita Tuna Susila dapat memperoleh dukungan dan bantuan moral sebagai wujud rasa kepedulian masyarakat akan bagaimana nasib yang mereka jalani

E. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas 5 bab yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Memuat uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka

Memuat Uraian tentang berbagai teori yang berhubungan dengan Strategi Rehabilitasi Wanita Tuna Susila.

Bab III : Metodologi Penelitian

Membahas masalah, Jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang hasil-hasil penelitian yang memuat data-data pada fokus penelitian, kemudian dianalisis dan di interpretasikan.

Bab V : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran berdasarkan permasalahan yang ada.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Setiap organisasi, baik itu organisasi publik maupun organisasi privat mempunyai sejumlah langkah-langkah atau cara yang disusun secara sistematis dalam rangka menjalankan segala aktifitas kegiatan. Langkah-langkah tersebut merupakan rangkaian kebijakan yang dituangkan dalam bentuk strategi. Strategi merupakan rangkaian dari perencanaan suatu kegiatan, yang meliputi berbagai kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pengertian dasar strategi di definisikan oleh beberapa ahli. Menurut Siagian (1989:10) strategi berasal dari bahasa Yunani yakni “Stratos” yang berarti pasukan dan “agian” yang berarti memimpin. Siagian (2007:17) juga menjelaskan bahwa yang dimaksud strategi bagi organisasi adalah:

Rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.

Pengertian strategi menurut Kamus Bahasa Indonesia (1997:964) adalah:

1. Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.
2. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan.
3. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus.
4. Tempat yang baik untuk menurut siasat perang.

Strategi dapat dibedakan berdasarkan dua prespektif yang berbeda yaitu:

1. Dari prespektif apa yang organisasi ingin lakukan (*intends to do*)

Sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya.

2. Dari prespektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*)

Sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Bintoro Tjokroamidjojo (1993:13) mendefinisikan strategi sebagai:

Keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan yang pasti, guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan. Bintoro juga menjelaskan bahwa strategi merupakan rangkaian kebijaksanaan dan pelaksanaan (*policy decision and execution*) dalam mencapai tujuan atau memecahkan persoalan tertentu.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan strategi.

Sadono Sukirno (1985:50) menyatakan bahwa di dalam penyusunan strategi pembangunan ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain

1. Masalah-masalah yang dihadapi.
2. Jumlah dan kualitas sumber daya, dalam bentuk modal, tenaga ahli, keahlian pengusaha, dan pengetahuan teknik yang tersedia.
3. Tujuan-tujuan yang ingin dituju.

Strategi dapat pula diartikan sebagai seni dan ilmu untuk dapat mencapai suatu tujuan dengan menggunakan cara-cara baru. Dan strategi dalam ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Menurut Siagian (1989:10), terdapat beberapa ciri-ciri pendekatan strategi antara lain :

- a. Strategi memusatkan perhatian pada kekuatan, kekuatan adalah fokus pokok dalam pendekatan strategi.
- b. Strategi memusatkan perhatian pada analisa dinamik, analisa gerak dan analisa aksi.
- c. Strategi memperhitungkan pada faktor waktu (sejarah masa lampau, masa kini dan masa depan) dan faktor lingkungan.
- d. Strategi berusaha menemukan masalah yang terjadi dari peristiwa yang ditaksirkan berdasarkan konteks kekuatan kemudian menganalisa mengenai kemungkinan serta perhitungannya langkah dan pilihan yang dapat diambil dalam rangka bergerak menuju tujuan itu.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah rangkaian kebijaksanaan atau langkah-langkah yang digunakan dalam usaha untuk memecahkan permasalahan, dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi Sumber Daya Manusia (human resources strategy) adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur ke dalam rencana keseluruhan yang kohesif. Strategi sumber daya manusia yang terformulasikan dengan baik akan membantu mengumpulkan dan mengalokasikan dengan baik sumber-sumber daya perusahaan ke dalam suatu entitas unik berdasarkan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan internalnya, perubahan-perubahan lingkungan dan tindakan-tindakan pesaing yang terantisipasi. (Henry Simamora,1997,4.39).

Secara teoritis Salusu (1996, h.99) menyatakan bahwa konsep strategi berkaitan dengan komponen atau determinan sebagai berikut:

- a. Tujuan dan sasaran: tujuan orang merupakan keinginan yang secara umum hendak dicapai pada waktu yang akan datang. Sedangkan sasaran orang adalah pernyataan yang secara optimal mengarahkan kita pada pencapaian tujuan dalam waktu tertentu, secara periodik bulanan atau tahunan dan terperinci dengan jelas.

- b. Lingkungan: tidak dapat disangkal antara orang dengan lingkungan merupakan simbiosis mutualisme, yang berarti keduanya terjadi interaksi yang saling mempengaruhi dan menguntungkan.
- c. Kemampuan internal: kemampuan organisasi untuk melaksanakan rencana kerjanya bertolak dengan tersedianya sumber daya
- d. Kompetensi: yaitu suasana persaingan yang menyebabkan orang harus mengukur kemampuan internal dengan melihat tantangan dan peluang yang mungkin diraih.
- e. Komunikasi: penyusunan strategi jelas harus dikomunikasikan karena komunikasi akan banyak memberikan informasi mengenai tuntutan lingkungan (internal maupun eksternal) yang tidak kita ketahui dan tidak pernah diramalkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi dapat berjalan lancar jika didukung dengan komponen-komponen strategi yang tepat. Diharapkan komponen strategi ini dapat diterapkan bagi perusahaan agar bisa bertahan di lingkungan bisnis yang semakin kompetitif.

Strategi secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu strategi umum (*grand strategy*) dan strategi fungsional (*functional strategy*). Menurut Belohlav dan Giddens-Ering (Pearce-Robins dalam Agus Maulana, 1997:35-37) mengartikan semua strategi umum sebagai “Rumusan rinci yang harus dilaksanakan oleh setiap bidang fungsional dalam suatu perusahaan guna mengimplementasikan strategi umum”.

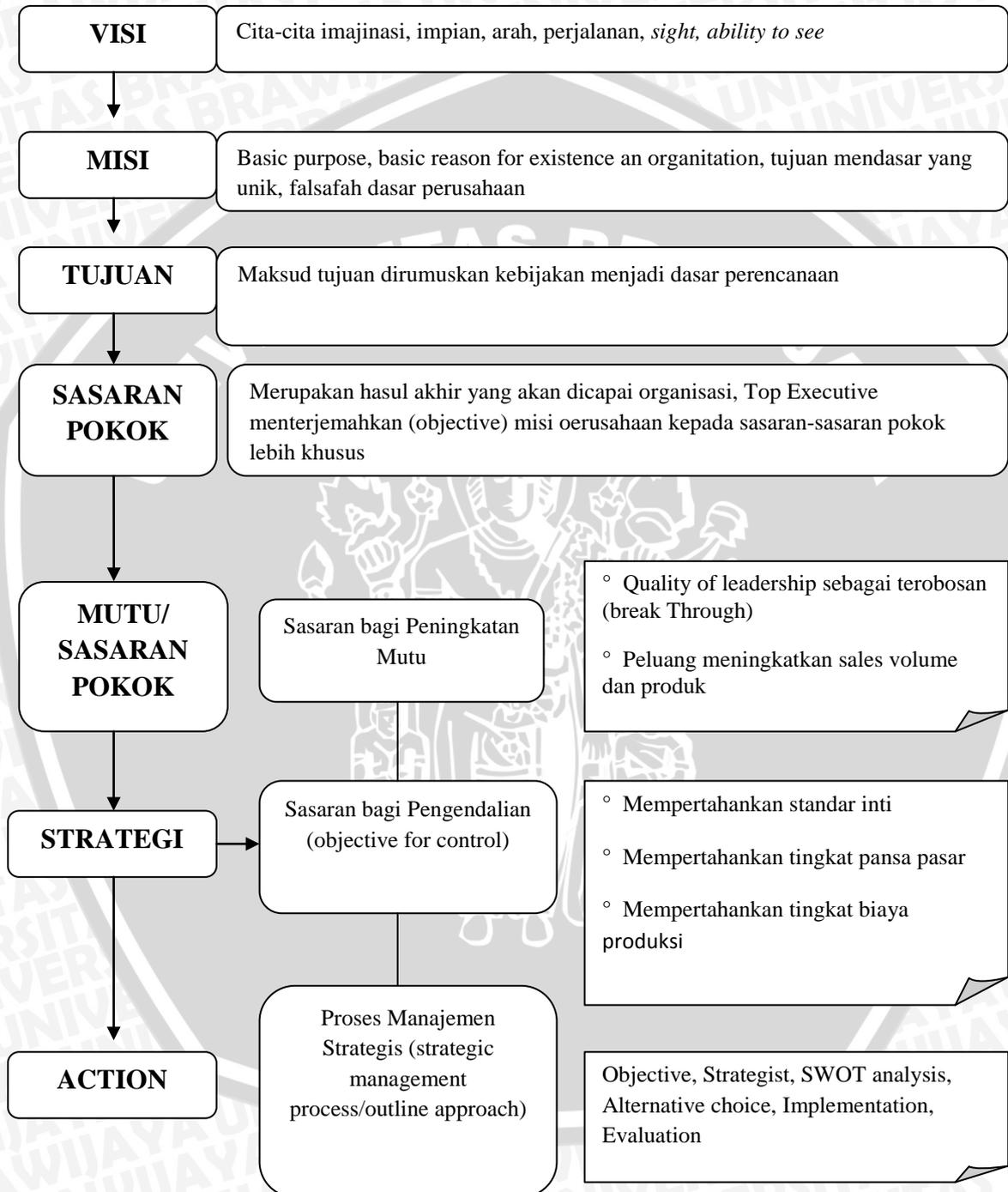
Dengan demikian strategi umum merupakan strategi induk yang akan dilakukan perusahaan untuk jangka panjang dan masih bersifat umum, sedangkan strategi fungsional merupakan penjabaran dari strategi induk yang disesuaikan dengan strategi masing-masing bidang dan lingkungan yang dihasapinya secara lebih rinci dan biasanya untuk jangka pendek.

Ada tiga hal yang membedakan strategi umum dan strategi fungsional yaitu:

- a. Cakupan waktu, dimana strategi fungsional merencanakan kegiatan yang akan dilakukan sekarang atau dalam waktu dekat sedangkan strategi umum difokuskan untuk masa tiga sampai lima tahun ke depan.
- b. Kesespesifikan, dimana strategi fungsional lebih spesifik dari strategi umum yang dibuat oleh masing-masing bidang dan ditunjukkan untuk bidang tersebut dengan mengacu kepada strategi umum.
- c. Peserta dalam pengembangan strategi, dimana dalam pengembangan kedua strategi tersebut melibatkan orang yang berbeda dalam perumusan dan pelaksanaannya. Strategi umum merupakan tanggung jawab manajer umum (*general manager*) suatu perusahaan dan dilaksanakan oleh para manajer operasional, sedangkan strategi fungsional merupakan tanggung jawab masing-masing manajer operasional kunci dan dilaksanakan oleh para bawahannya.

Gambar 1

Tahapan Penyusunan Strategi



Sumber : <http://blog.unila.ac.id/redha/2009/02/23/tahapan-penyusunan-strategi>

2. Jenis-jenis Strategi

Perencanaan strategi melibatkan analisis yang mendalam terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Penilaian tersebut harus sesuai dengan visi, misi, tujuan dan kebijakan perusahaan. Dengan kesesuaian tersebut, maka strategi yang ditetapkan akan sinergis dengan perusahaan dan bukannya menghambat pencapaian tujuan dari perencanaan strategi tersebut. Berikut strategi menurut Wheelen dan Hunger (2001, h.24) dibagi menjadi :

- a. Strategi tingkat korporasi adalah, strategi yang menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dari manajemen berbagai bisnis dan lain produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa.
- b. Strategi tingkat bisnis adalah, strategi yang biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi perusahaan produk atau jasa perusahaan dalam industri khususnya atau segmen dasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi bisnis divisi menekankan pada peningkatan laba dalam produksi dan penjualan produk dan jasa yang dihasilkan. Strategi bisnis sebaiknya juga menginterpretasikan berbagai aktivitas fungsional untuk mencapai tujuan divisi. Strategi bisnis merupakan salah satu dari overall cost leadership atau diferensial
- c. Strategi fungsional adalah, strategi yang menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas. Dalam batasan perusahaan dan strategi bisnis yang berada disekitar mereka, departemen fungsional mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna memperbaiki kinerja.

Selanjutnya Korten dan Alfonso dalam Suryono (2001:85) menambahkan jenis strategi pembangunan yaitu:

- a. Strategi Kesejahteraan (*Welfare Strategy*)

Bertujuan memperbaiki kehidupan masyarakat banyak melalui berbagai sektor. Cirinya bantuan pemerintah atau subsidi dianggap bersifat pemberian cuma-cuma dengan asumsi bahwa masyarakat miskin dan tidak memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang mereka kehendaki.

b. Strategi Jawaban (*Respons Strategy*)

Merupakan jalan keluar terhadap kelemahan welfare strategy yang menganggap bahwa masyarakat bodoh dan perlunya intervensi pemerintah atasan dalam program-program pembangunan masyarakat. Fungsi pemerintah hanya memberikan respon atau dukungan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan memberi bantuan teknologi, sumber daya dan dana, yang diharapkan dapat mendorong masyarakat memenuhi kebutuhannya.

c. Strategi Menyeluruh (*Holistic Strategy*)

Memiliki tujuan yang lebih bervariasi dan bersifat kompleks dengan sasaran pokok menciptakan keadilan (*equity*), pemerataan (*distribution*) dan partisipasi dalam proses pembangunan.

Berdasarkan jenis-jenis strategi tersebut, maka strategi rehabilitasi wanita tuna susila merupakan strategi yang menyeluruh. Dengan strategi rehabilitasi diharapkan tercapai tujuan yang menyeluruh yaitu memberikan bimbingan kepada para wanita tuna susila tersebut dengan mengambil langkah-langkah berupa resosialisasi bagi para wanita tuna susila agar mereka dapat kembali dimasyarakat dengan pekerjaan yang halal.

3. Pemilihan Strategi

Pemilihan Strategi merupakan proses mengambil keputusan untuk memilih sejumlah alternatif strategi utama yang memungkinkan untuk dipilih. Menurut Pearce dan Robinson (1997, h.362) faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi yaitu:

- a. Peran strategi lalu, penyusunan strategi yang sekarang seringkali juga merupakan arsitek strategi yang lalu. Strategi masa lalu sangat mempengaruhi pilihan strategi sekarang. Makin tua dan makin berhasil suatu strategi maka sukar untuk diganti. Demikian pula, setelah suatu strategi dimulai, sangat sukar diubah karena momentum organisasi terus membuatnya berjalan.
- b. Tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar, jika suatu perusahaan sangat bergantung pada satu atau beberapa elemen lingkungan, alternatif strateginya dan pilihan strateginya harus mempertimbangkan perusahaan pada pihak luar, makin kecil ragam dan fleksibilitasnya dalam pemilihan strategi.
- c. Pertimbangan resiko, sikap terhadap resiko sangat mempengaruhi pilihan strategi. Jika sikap perusahaan menyukai resiko, kisaran pilihan strategi bertambah luas dan strategi resiko tinggi dapat diterima dan disukai. Bila manajemen bersikap menghindari resiko, ragam pilihan strategi terbatas dan alternatif yang beresiko tinggi akan dihilangkan sebelum pemilihan strategi dilakukan.
- d. Pertimbangan internal, faktor kekuasaan/politisi mempengaruhi pilihan strategi. Penggunaan kekuasaan/politisi untuk mendesak kepentingan kelompok merupakan hal yang lazim dalam kehidupan berorganisasi.
- e. Saat (*timing*), strategi yang baik dapat berbahaya jika dilaksanakan pada waktu yang salah, oleh karena itu, *timing* sangat berpengaruh dalam pemilihan strategi.
- f. Reaksi pesaing, dalam mempertimbangkan pilihan strategi, perubahan seringkali memasukkan persepsi pesaing yang mungkin terhadap pilihan strategi. Dalam mempertimbangkan pilihan, perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak yang mungkin dari reaksi pesaing atas keberhasilan strategi yang dipilih.

Orientasi strategi adalah bertumpu pada implikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Agar penyusunan strategi dapat berjalan dengan tepat sasaran dan diimplementasikan secara efektif, maka ada empat hal mutlak yang perlu diperhatikan :

- a. Strategi yang dirumuskan harus konsisten dengan situasi yang dihadapi organisasi.
- b. Strategi yang dirumuskan harus mampu di satu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan pihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi dan kelangsungannya.
- c. Strategi harus memperhitungkan secara realistis kemampuan sesuatu organisasi dalam menyediakan berbagai daya, sarana, prasarana dan dana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan strategi tersebut.
- d. Strategi yang telah ditentukan dioperasionalkan secara teliti

Tolok ukur tepat tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusannya saja, tetapi juga mencakup pada operasional atau pelaksanaannya (Siagian, 2007:102-103). Penyusunan strategi harus melihat daerah yang dihadapi, penyusunan strategi harus mempertimbangkan segala aspek yang bisa dimanfaatkan sebagai faktor pendukung dalam melaksanakan strategi tersebut.

4. Manfaat Strategi

Strategi pada umumnya merupakan perhitungan mengenai rangkaian kebijaksanaan secara ilmiah. Strategi ditetapkan oleh organisasi sebagai kelanjutan dari perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Penentuan strategi ini tentunya tidak terlepas dari rantai kegiatan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Secara implisit Siagian (2007:206-209) mengungkapkan manfaat dari penetapan strategi pada organisasi antara lain:

- a. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan melalui identifikasi rincian yang lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola bidang-bidang yang ada di masa mendatang.
- b. Merupakan langkah-langkah atau cara yang efektif untuk implementasi kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Sebagai penuntun atau rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan diberbagai bidang.
- d. Dapat mengetahui secara konkrit dan jelas tentang berbagai cara untuk mencapai sasaran atau tujuan serta prioritas pembangunan pada bidang-bidang tersebut berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
- e. Sebagai rangkaian dari proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan.
- f. Mempermudah koordinasi bagi semua pihak agar mempunyai partisipasi dan persepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi, interpendensi dan interrelasi yang harus tetap tumbuh terpelihara dalam mengelola jalannya roda organisasi, sehingga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan timbulnya konflik antara pihak yang terkait, dengan demikian strategi dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

5. Rehabilitasi

Konsep rehabilitasi sesungguhnya ada sebagai upaya untuk membangun manusia agar berkembang secara utuh, dengan tidak memperlakukannya sebagai obyek perencanaan, namun berorientasi pada harapan-harapannya. Sehingga proses membangun manusia tersebut dilakukan dengan mengembalikan hubungan antar manusia dan manusia dengan lingkungannya.

Secara etimologis istilah rehabilitasi berasal dari bahasa Inggris “*rehabilitation*” yang terdiri dari kata *re* dan *habilitate*. *Re* dapat diartikan *again* sedangkan *habilitate* dapat diartikan *to make able*, sehingga rehabilitasi dapat diartikan sebagai: pembedulan, perbaikan atau pengembalian kepada kemampuan keadaan baik/betul (Isbani dan Ravik Karsidi, 1981:1). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:827) rehabilitasi yaitu pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula).

Rehabilitasi juga diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna. Menjadi manusia berguna disini dapat diartikan hidup sedemikian rupa sehingga Ia dapat berkembang, dapat membangun dan menemukan identitasnya, dapat menjadi bahagia. (Aquinas dalam Suseno, 1999:5).

Sedangkan menurut kamus istilah kesejahteraan sosial, rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembalikan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (1985:423), rehabilitasi diartikan sebagai suatu proses atau teknik mendidik kembali serta mengarahkan kembali dan motivasi pelanggar atau penjahat, sehingga perilakunya sesuai dengan aturan-aturan kemasyarakatan.

Dalam UU No. 14 Tahun 1970 rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Kemudian menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini. Pemulihan hak-hak seseorang sangat penting sebab hak-hak manusia adalah segi-segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang perlu dihormati agar manusia dihormati dalam martabatnya.

Dari pengertian rehabilitasi di atas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan pemfungsian serta pemulihan kembali kemampuan fisik, sosial serta

mental seseorang agar kembali ke keadaan normal sehingga mampu menjadi manusia yang berguna dan mampu menjalankan fungsinya dalam masyarakat.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat miskin identik dengan ketidakberdayaan, Sennet dan Cabb serta Conway mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakberdayaan masyarakat ekonomi lemah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ketiadaan jaminan ekonomi
- b. Ketiadaan pengalaman dalam arena politik
- c. Ketiadaan akses terhadap informasi
- d. Ketiadaan dukungan finansial
- e. Ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan
- f. Adanya ketegangan fisik maupun emosional (Suharto, 2005:61)

Oleh karenanya kebijakan pemberdayaan menjadi solusi bagi pemerintah dalam penanggulangan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Suharto (2005:58) mengatakan:

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005:58).

Pemberdayaan manusia menurut Eko (2002:3) terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Pemberdayaan psikologis-personal berarti mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi dan kontrol diri individu. Pemberdayaan struktural-personal berarti membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik yang timpang serta kapasitas untuk menganalisis lingkungan yang mempengaruhi dirinya. Pemberdayaan psikologis-masyarakat berarti menumbuhkan rasa memiliki, gotong royong, mutual trust, kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi kolektif masyarakat. Sedangkan pemberdayaan struktural-masyarakat berarti mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Hulme dan Turner mendefinisikan bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antar individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Di samping itu pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal (Shrage dalam Prijono dan Pranarka, 1996:62)

Suharto (2005:59) menyimpulkan pemberdayaan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Lebih lanjut Chambers dalam Kartasamita (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan suatu paradigma baru pembangunan, yaitu yang bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowering*, *sustainable*.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang bercirikan ketidakberdayaan. Dengan pendekatan pemberdayaan ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan non material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

2. Kendala dalam Perberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan tentunya juga mengandung resiko kegagalan. Prasojo (2004:11) menyebutkan terdapat 6 permasalahan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Diskontinuitas dan diskoordinasi, yaitu keseluruhan program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tidak dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan secara sporadic. Kebijakan pemerintah malah berseberangan dengan pendampingan LSM. Orientasi program yang dilaksanakan pemerintah, pada satu sisi menampakkan hasil nyata namun pada sisi yang lain terkadang tidak menyentuh akar permasalahan yang ada.
- b. Disinformasi program, yaitu pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan bantuan para konsultan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat atau lembaga pelaksana dari pemberdayaan masyarakat.
- c. Diorientasi, yaitu, pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses biasanya membutuhkan waktu yang lama. Banyaknya masalah baru yang muncul, disertai pula oleh hasil yang belum tampak nyata terkadang menjadikan fasilitator (pendamping), baik dari pemerintah atau LSM, mengubah kebijakan yang lebih nyata. Pergeseran pendekatan, dari proses ke hasil bukanlah solusi. Langkah sinergis yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan menyelaraskan kedua pendekatan tersebut.
- d. Generalisasi, yaitu deferensiasi sosial, politik, dan budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Dengan kondisi yang majemuk tersebut maka pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya pembangunan yang tidak bersifat monolitik, namun haruslah bersifat dinamis dengan memperhatikan nilai-nilai dasar di masyarakat, karakter budaya, serta struktur sosial masyarakat.
- e. Rentang Birokrasi dan tingginya biaya operasional, yaitu berbagai peraturan hukum dan Undang-undang pembangunan dan pemberdayaan yang bersifat kaku yang hanya didasarkan pada Surat Keputusan (SK), Petunjuk Pelaksana (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) juga sistem penganggaran yang sering menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini menyebabkan sulitnya petugas lapangan berhadapan dengan kenyataan yang membutuhkan fleksibilitas. Akibatnya tujuan pemberdayaan masyarakat sulit dicapai karena orientasi petugas lebih kepada peraturan daripada menjawab kebutuhan lapangan.
- f. Indikator yang tidak tepat, pemberdayaan masyarakat selama ini diukur dalam bentuk fisik komoditas dengan berorientasi pada input dan kualitatif daripada non-fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses. Kesadaran akan nilai, hukum ataupun partisipasi politik masyarakat yang

terkadang tidak dapat diukur diabaikan. Dengan demikian, kebutuhan akan indikator yang mencakup semua hal menjadi sangat penting.

Rajanbar membagi kendala pemberdayaan masyarakat dalam beberapa faktor. Antara lain (a) kehidupan masyarakat yang terasing serta kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi. Kondisi ini tentunya akan menyebabkan masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat yang lain yang mungkin akan memperkaya kehidupan sosial budayanya sendiri; (b) sikap masyarakat yang cenderung bertindak terhadap sesuatu obyek, serta beranggapan bahwa tradisi secara mutlak tak dapat diubah (Nasirin, 2010:111)

3. Model-model Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu;

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah

punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya

modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (Protectly)

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi semakin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan kepada yang lemah amat medasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat dari upaya untuk mencegah terjadi nya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploritasi yang kuat atas yang lemah.

Pemahaman dalam pemberdayaan masyarakat memerlukan sikap yang subjektif dalam penelitiannya, subjektifitas ini bertolak dari sikap dasar bahwa setiap penelitian tentang suatu permasalahan sosial selalu dilakukan untuk memperbaiki situasi sosial yang ada, untuk meluruskan ketimpangan yang ada dan bukan hanya melukiskan serta menerangkan kenyataan yang ada (Buchori, 1993).

Dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang *Deficit Based* dan *Strength Based*. Pendekatan *Deficit-based* terpusat pada berbagai macam permasalahan yang ada serta cara-cara penyelesaiannya. Keberhasilannya tergantung pada adanya identifikasi dan diagnosis yang jelas terhadap masalah, penyelesaian cara pemecahan yang tepat, serta penerapan cara pemecahan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadinya situasi saling menyalahkan atas masalah yang terjadi.

Di sisi lain, pendekatan *Strength Based* (Berbasis kekuatan) dengan sebuah produk metode *Appreciative Inquiry* terpusat pada potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk menjadikan hidup lebih baik. *Appreciative Inquiry* merupakan sebuah metode yang mentransformasikan kapasitas sistem manusia untuk perubahan yang positif dengan memfokuskan pada pengalaman positif dan masa depan yang penuh dengan harapan (Cooperrider dan Srivastva, 1987; Cooperrider dkk., 2000; Fry dkk, 2002; Ludema dkk, 2000, dalam Gergen dkk., 2004).

Dalam metode untuk pemberdayaan masyarakat juga dapat dibangun berdasarkan beberapa aspek, antara lain:

1. Kemampuan-kemampuan masyarakat setempat
2. Penggunaan teknik-teknik fasilitatif dan partisipatoris
3. Pemberdayaan masyarakat desa dalam prosesnya (Khan and Suryadanata, 1994).

4. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses belajar, sehingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian, dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus-menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam tiga fase, yaitu fase inisial, fase partisipatoris dan fase emansipatoris (Priyono dan Pranarka, 1996:2).

Pada fase inisial, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan untuk pemerintah. Dalam hal ini rakyat bersifat pasif, melaksanakan apa yang direncanakan oleh pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah. Pada fase partisipatoris, proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama-sama rakyat, oleh pemerintah bersama rakyat, dan diperuntukkan kepada rakyat, pada fase ini rakyat sudah dilibatkan secara aktif untuk menuju kemandirian. Sedangkan pada fase emansipatoris, proses pemberdayaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan didukung pemerintah.

Adapun tahap-tahap pemberdayaan masyarakat seperti diungkap oleh Sulistiyani (2004:83), adalah sebagai berikut:

- a. Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, dimana pihak pemberdayaan/ aktor perilaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupan wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan ketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian masyarakat dalam bentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi di dalam lingkungannya. Pada tahap ini masyarakat akan mandiri dalam melakukan pembangunan. Pemerintah hanya sebagai fasilitator saja.

5. Mekanisme Pemberdayaan masyarakat

Seperti dikemukakan Kartasasmita (1997:15), pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek di antaranya dapat diketengahkan sebagai berikut :

1. Peranan pemerintah teramat penting. Berarti birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi dan visi.
2. Organisasi-Organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat sendiri. Disini yang mempunyai fungsi dan peran yang besar adalah

lembaga-lembaga swadaya masyarakat, (LSM) dalam membantu peran pemerintah.

3. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri atau yang sering di sebut local community organizationt. Lembaga ini dapat bersifat semi atau kulisi, seperti LKMD, PKK, atau Karang Taruna, Atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok sinoman, dan segainya.
4. Koperasi, merupakann wadah ekonomi rakyat yang secara khusus di nyatakan dalam kontitusi yang paling sesuai untuk membangun ekonomi indonesia. pemberdayaan masyarakat harus dicerminkan dalam proses perencanaan
5. Pendamping. Penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator.
6. Pemberdayaan masyarakat harus dicerminkan dalam proses perencanaan pembangunan nasional, sebagai aliran dari bawah ke atas.
7. Keikutsertaan masyarakat yang lebih mampu, khususnya dunia usaha dan swasta. Pemberdayaan masyarakat dapat lebih optimal jika terjadi keterkaitan dalam kemitraan usaha diantara yang telah mampu dengan yang masih tertinggal terutama melalui penyediaan modal usaha

C. Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Keberadaan wanita tuna susila atau pelacur ini pada dasarnya telah marak dalam masyarakat, namun seringkali mereka melakukan profesinya secara terselubung. Ada berbagai macam bentuk prostitusi, baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Selain itu Soedjono (1982:124) juga mengategorikan pelacuran dengan kelas-kelas seperti:

- 1) Pelacuran kelas rendah (jalanan, bordil-bordil murahan).
- 2) Pelacuran menengah yang berada di bordil-bordil tertentu yang cukup bersih dan pelayanannya baik.
- 3) Pelacuran kelas tinggi, biasanya pelacur tinggal di rumah sendiri (terselubung tersembunyi) dan hanya menerima panggilan dengan perantara yang cukup rapi sehingga sulit diketahui dan bayarannya cukup mahal.

Selain bentuk-bentuk pelacuran di atas, ada pula kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pelacuran. Menurut Kartini Kartono (1981:217-220), yang dimasukkan dalam kategori pelacuran antara lain:

- 1) Pergundikan yaitu pemeliharaan bini tidak resmi, bini gelap atau perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan perkawinan. Gundik-gundik orang asing ini pada zaman pemerintahan Belanda dahulu disebut *nyai*.
- 2) Tante girang atau *loose married woman* yaitu wanita yang sudah kawin, namun tetap melakukan hubungan erotik dan seks dengan laki-laki lain, baik secara iseng untuk mengisi waktu kosong, bersenang-senang "*just for fun*" dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks lain maupun secara intensional untuk mendapatkan penghasilan.
- 3) Gadis-gadis panggilan ialah gadis-gadis dan wanita-wanita biasa yang menyediakan diri untuk dipanggil dan diperkerjakan sebagai *prostitute*, melalui saluran-saluran tertentu. Mereka ini terdiri atas ibu-ibu rumah tangga, pelayan-pelayan toko, pegawai-pegawai, buruh-buruh perusahaan, gadis-gadis lanjutan, para mahasiswi, dan lain-lain.
- 4) Gadis-gadis bar atau B-girls yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar, dan sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung.

- 5) Gadis-gadis *juvenile delinquent*: yaitu gadis-gadis muda dan jahat yang didorong oleh ketidakmatangan emosinya dan retardasi/keterbelakangan inteletiknya, menjadi sangat pasif dan sugestibel sekali. Karakternya sangat lemah. Sebagai akibatnya, mereka itu mudah sekali jadi pecandu minuman keras atau alkoholik dan pecandu obat-obat bius (ganja, heroin, morfin, dll), sehingga mudah tergiur melakukan perbuatan immoral seksual dan pelacuran.
- 6) Gadis-gadis binal atau *free girls*: di Bandung mereka menyebut diri mereka sebagai “bagong lieur” (babi hutan yang mabuk). Mereka itu adalah gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus studi di perguruan tinggi, dengan pendirian yang agak “brengek” dan menyebarkan kebebasan seks secara ekstrem untuk mendapatkan kepuasan seksual. Mereka menganjurkan seks bebas dan cinta bebas.
- 7) Gadis-gadis taxi (di Indonesia ada juga gadis-gadis becak) yaitu wanita-wanita dan gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dibawa ke tempat “plesiran” dengan taxi atau becak.
- 8) Penggali emas atau *gold-diggers* yaitu gadis-gadis dan wanita-wanita cantik-ratu-ratu kecantikan, pramugari/mannequin, penyanyi, pemain panggung, bintang film, dan lain-lain yang pandai merayu dan bermain cinta, untuk mengeduk kekayaan orang-orang berduit. Pada umumnya sulit sekali mereka itu diajak bermain seks. Yang diutamakan oleh mereka ialah: dengan “kelihaiannya” menggali emas dan kekayaan dari para “kekasihnya”.
- 9) *Hostes* atau pramuria yang menyemarakkan kehidupan malam dalam *nightclub-nightclub*. Pada intinya profesi *hostes* merupakan bentuk pelacuran halus. Sedang pada hakikatnya, *hostes* itu adalah predikat baru dari pelacuran. Sebab, di lantai-lantai dansa mereka itu membiarkan diri dipeluk, dicium dan diraba-raba dan diremas-remas oleh langganannya. Para *hostes* ini harus melayani makan, minum, dansa dan memuaskan naluri-naluri seks para langganannya dengan jalan menikmati tubuh para *hostes*/pramuria tersebut. Dengan demikian langganannya bisa menikmati keriaan atau kesenangan suasana tempat hiburan.
- 10) *Promiskuitas/promiscuity* ialah hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria manapun juga, dilakukan dengan banyak laki-laki.

2. Akibat Kegiatan Prostitusi atau Pelacuran

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya prostitusi yaitu:

1. Bidang Medis

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa prostitusi mengakibatkan timbulnya penyalit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak

adalah *syphilis* dan *gonorrhoe* (kencing nanah) serta penyakit yang sangat berbahaya yaitu AIDS.

2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga yang wajar

Suami-suami yang sudah tergoda oleh pelacur biasanya sudah tidak mempedulikan keluarganya lagi dan melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga dapat mengakibatkan keluarga berantakan.

3. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama

Sendi-sendi tersebut diganti dengan pola-pola prostitusi yang promiskuitas yaitu pola pemuasan kebutuhan seks. Bila pelacuran telah membudaya, maka rusaklah sendi-sendi kehidupan yang sehat.

4. Memberi pengaruh yang buruk pada anak-anak muda yang baru menginjak dewasa yang biasanya sangat peka terhadap hal-hal seksual.

5. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain

Pada umumnya wanita pelacur cuma menerima upah sebagian kecil dari pendapatan yang harus diterimanya, karena sebagian besar harus diserahkan kepada geromo, calo-calo dan centeng-centeng.

6. Cenderung menciptakan kejahatan dalam berbagai variasinya.

3. Wanita Tuna Susila

Wanita Tuna Susila dikenal dengan nama lain wanita pelacur, dan dalam istilah pers lebih dikenal dengan nama pekerja seks komersial (PSK). Menurut Kartini (1992:183), wanita tuna susila adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dengan berganti-ganti pasangan,

dengan maksud untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang ataupun barang bahkan tanpa imbalan sekalipun. Sedangkan menurut Soedjono (1982:112) “wanita pelacur adalah wanita yang menjual dirinya kepada laki-laki (dengan menerima bayaran atas *service* yang diberikannya)”.

Dalam menjalankan profesinya, wanita tuna susila berkecimpung dalam bisnis yang disebut prostitusi. Prostitusi itu sendiri merupakan sebutan bagi profesi yang digeluti oleh para wanita tuna susila tersebut. Prostitusi berasal dari kata “*Prostituere*” (bahasa latin) yang berarti menonjolkan diri dalam hal-hal yang buruk atau tercela atau menyerahkan diri secara terang-terangan kepada umum. Sedangkan istilah umum yang sering digunakan untuk menyebut profesi para wanita tuna susila atau para pelacur ini adalah pelacuran. Pelacuran dapat diartikan sebagai penyerahan badan wanita dengan pembayaran, kepada orang laki-laki guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu. (Soedjono, 1982:122-123).

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian Wanita Tuna Susila (WTS) adalah wanita yang menjual diri kepada laki-laki dan menyerahkan diri kepada umum untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

4. Penyebab Munculnya Wanita Tuna Susila

Permasalahan wanita yang merelakan dirinya hidup sebagai pelacur atau Wanita Tuna Susila sangatlah kompleks. Pelacuran dapat diterima sebagai bagian

dari mekanisme produksi dan mekanisme kapitalis sebagai suatu prinsip ekonomi yang paling primitif yaitu keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Berbagai faktor pendorong atau penyebab bagi sebagian wanita yang mengalami kehidupan sebagai pelacur tidaklah sama, karena masing-masing mempunyai alasan tersendiri sehingga menjadi pelacur, baik secara sukarela dalam arti memang menginginkan untuk menjadi pelacur maupun secara terpaksa. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk menjadi seorang pelacur, antara lain :

- a. Faktor ekonomi : kemiskinan, ingin hidup mewah dan lain-lain
- b. Faktor sosiologis : urbanisasi, keadilan sosial dan lain-lain
- c. Faktor Psikologis : rasa ingin balas dendam, malas bekerja, histeris dan lain-lain (Soedjono,1982:125)

Marzuki Umar Sa'bah dalam bukunya "Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer" (2001:70) menyatakan bahwa penyebab wanita menenggelamkan diri ke lembah hitam pelacuran adalah :

- a. Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan adanya penyiksaan seksual yang dialami dalam keluarga.
- b. Jauhnya seseorang dari kemungkinan hidup secara normal akibatnya rendahnya pendidikan yang dimiliki, kemiskinan dan gambaran jaminan pekerjaan dan masa depan yang tidak jelas.
- c. Hasrat berpetualang dan kemudahan dalam mencari uang juga mendorong kearah melacur.
- d. Hubungan seks yang terlalu dini, keterlibatan pada satu pergaulan yang selalu mengrongrong dan mungkin juga dikombinasikan dengan pengaruh obat-obatan terlarang dan alkohol.
- e. Ada juga yang memandang perasaan benci kepada ayah yang diletupkan dengan cara melacur diri dari pelukan lelaki satu ke lelaki yang lain.
- f. Paduan antara kemiskinan, kebodohan dan tekanan penguasa.
- g. Tentunya keluarga yang menimbulkan anak bermasalah seperti itu tentunya merupakan keluarga yang gagal memfungsikan perannya sebagai pembina nilai-nilai keagamaan atau mungkin nilai-nilai agama yang dianut tidak

memberikan dasar untuk menolak pelacuran, menciptakan keluarga sejahtera serta menciptakan terlaksananya moralitas anti eksploitasi seks.

Sementara itu Ali Akbar (Cahyo,1985:1000) mengemukakan bahwa ada enam faktor mengenai wanita menjadi pelacur yaitu :

- a. Tekanan ekonomi, karena tidak ada pekerjaan, terpaksa mereka hidup menjual diri sendiridengan jalan dan cara yang paling mudah.
- b. Karena tidak puas dengan posisi yang ada.
- c. Karena kebodohan, tidak mempunyai pendidikan yang baik.
- d. Cacat kejiwaan
- e. Karena sakit hati, ditinggal suami atau setelah dinodai kekasih ditinggal begitu saja.
- f. Karena tidak puas dengan kehidupan sosial atau hiperseksual.

Terlepas dari berbagai faktor di atas ada satu faktor yang tidak dapat ditinggalkan yaitu faktor permintaan daripada laki-laki. Karena jika faktor itu sudah tidak ada maka otomatis keberadaan Wanita Tuna Susila juga tidak akan pernah ada. Berbagai faktor pendorong atau penyebab yang disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wanita yang menjadi pelacur ada yang disebabkan oleh terdesak keadaan, juga dikarenakan kesadaran atau sukarela, sedangkan kesediaan yang terdesak ini disebabkan oleh faktor sosial, sedangkan kesediaan secara sukarela menjadi pelacur dipengaruhi faktor psikologis.

5. Ciri-ciri Wanita Tuna Susila

Adapun ciri-ciri yang khas yang melekat pada diri seorang wanita tuna susila (WTS) adalah sebagai berikut (Kartini,1981: 229-230)

- a. Wanita
- b. Cantik, rupawan, manis, atraktif, menarik baik wajah maupun tubuhnya bisa merangsang seks kaum pria.
- c. Masih muda, hampir 75% dari jumlah pelacur di kota usianya dibawah 30 tahun.

- d. Pakaianya sangat mencolok, beraneka ragam, sering aneh-aneh agar dapat menarik perhatian kaum pria.
- e. Menggunakan teknik-teknik seksual yang mekanistik, sepat, tidak hadir secara psikis. Tanpa emosi, sulit mencapai orgasme, sangat provokatif dalam berhubungan dan biasanya dilakukan dengan kasar.
- f. Bersikap sangat mobil, kerap berpindah tempat atau kota, biasanya mereka menggunakan nama samaran.
- g. Pelacur-pelacur profesional dari kelas menengah kenyataannya berasal dari strata sosial dan strata ekonomi rendah. Sedangkan pelacur-pelacur kelas tinggi biasanya berpendidikan akademi atau perguruan tinggi.
- h. 70 % dari jumlah pelacur mempunyai intelek yang normal, kurang dari 5% adalah mereka yang lemah ingatan. Selebihnya adalah mereka yang berada pada garis batas, yang tidak menentu atau tidak jelas derajat intelegensinya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi wanita tuna susila merupakan upaya untuk menanggulangi masalah wanita tuna susila agar mereka hidup layaknya penduduk lain yang mengetahui nilai dan norma susila yang berlaku, serta dapat berkarya sesuai dengan harkat dan martabat wanita dan menjadi anggota masyarakat secara normatif melalui pemfungsian serta pemulihan kembali kemampuan fisik, sosial serta mental dari wanita tersebut. Dengan demikian diharapkan mereka benar-benar dapat berkarya dari segi fisik, mental dan sosial serta mempunyai bekal ketrampilan, sehingga nantinya mereka tidak lagi menjadi sampah masyarakat dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

D. Lokalisasi

1. Pengertian Lokalisasi

Dalam melihat pengertian lokalissi pelacuran (Wanita Tuna Susila) pendapat pertama yang perlu kita pahami yaitu pendapat dari Soedjono tentang

lokalisasi Wanita Tuna Susila. Menurut Soedjono (1997:138), lokalisasi pelacuran yaitu membatasi daerah pelacuran disuatu tempat tertentu, dengan pertimbangan utama untuk menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi pelacuran jalanan dan pelacuran bordil yang ada di kota pada masyarakat ramai yang menimbulkan kesan dan akibat buruk.

Pendapat lain tentang lokalisasi menurut Bosu (1982:48), adalah suatu tempat yang diatur oleh pemerintah daerah sebagai tempat berkumpulnya wanita tuna susila, dengan atau tanpa germo, guna mengikuti program eksploitasi disamping pekerjaannya sebagai seorang pelacur.

Sementara itu Purnomo memberi gambaran bahwa di dalam kompleks pelacuran, para pelacur dijadikan suatu masyarakat tersendiri dengan subkultural yang khas . Kompleks pelacuran merupakan tempat penampungan para pelacur, yang dimaksudkan untuk memojokkan atau membatasi usaha germo dan operasi pelacuran dari keramaian kota agar pengaruh asusila yang ditimbulkan tidak mengganggu masyarakat umum. Juga untuk menghindarkan praktek pelacuran di jalanan dan menghapuskan bordil-bordil liar yang ada di sela-sela rumah penduduk.

2. Keberadaan Lokalisasi

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka suatu lokalisasi mempunyai kebaikan dan keburukan. Hal tersebut tergantung dari sisi mana kita memandang keberadaan lokalisasi tersebut. Oleh karena itu

memunculkan pihak yang setuju (pro) dan yang (kontra) dengan diadakannya lokalisasi.

Dari pihak yang pro mengatakan bahwa kebaikan lokalisasi sebagai berikut (Simanjutak,1981:280) :

- a. Prostitusi gelap, liar akan hilang.
- b. Memudahkan pengawasan, baik untuk yang terpusat maupun yang berkeliaran
- c. Mengurangi jumlah prostitusi.
- d. Memudahkan pengawasan terhadap terjangkitnya penyakit kelamin.
- e. Memudahkan diadakannya edukasi dan re-edukasi.
- f. Memudahkan pengawasan terhadap orang yang melakukan tindakan kriminal yang sering membuat tempat-tempat pelacuran sebagai rumahnya.
- g. Mengeliminir pengaruh negatif gejala prostitusi dari pergaulan yang normal.

Sedangkan golongan kontra mengemukakan keburukan lokalisasi sebagai berikut (Simandjutak,1984:71) :

- a. Pemerintah melegalsir prostitusi.
- b. Pemerintah membantu timbulnya secara mekar gejala demoralisasi.
- c. Pemerintah memperbesar pembiayaan karena adanya pengawasan pasti harus ada dana yang harus dicadangkan.
- d. Pemerintah merugikan nama serta mengorbankan perasaan masyarakat baik-baik yang bertempat tinggal di tempat itu.
- e. Menyuburkan, menimbulkan sikap yang keliru pada pelacur karena pekerjaan yang halal.

3. Institusi Pemerintah yang Berhubungan langsung dengan Lokalisasi

Dalam melakukan pembinaan dan penanganan masalah-masalah sosial seperti Wanita Tuna Susila merupakan tugas dari Dinas Sosial. Dikarenakan masalah pelacuran ini merupakan permasalahan yang kompleks dan erat hubungannya dengan masalah ekonomi, keamanan, agama dan budaya maka pemerintah menunjuk instansi terkait untuk membantu pelaksanaan program pembinaan Wanita Tuna Susila.

Lembaga yang bersangkutan adalah kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan serta institusi-institusi lain yang sedikit banyak bersinggungan dengan masalah prostitusi. Institusi tersebut diharapkan dapat membantu dan mendukung kerja dari Dinas Sosial untuk menciptakan situasi kondusif dalam kerangka pembangunan untuk kemakmuran dan kesejahteraan yang mengarah kepada Pembinaan Wanita Tuna Susila terutama di lokalisasi-lokalisasi.

Pembinaan yang dilakukan di dalam lokalisasi secara garis besar adalah pembinaan yang bersifat fisik dan mental spiritual yang meliputi pendidikan keterampilan, agama dan kesehatan. Di samping kegiatan rutin yang khusus bagi Wanita Tuna Susila ada pula kegiatan rutin yang diperuntukkan bagi para mucikari yaitu kegiatan keagamaan.

E. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan secara harfiah mengandung makna yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu tentang suatu hal yang

menjadi ciri utama dari kata tersebut. Kesejahteraan bermula dari kata “sejahtera”, yang berarti aman, sentosa, makmur atau selamat artinya lepas dari segala macam gangguan dan kesukaran (Sumarnonugroho,1991:27).

Kemudian istilah kesejahteraan ini sering dikaitkan dengan kesejahteraan sosial, yaitu suatu sistem yang terorganisasi di bidang pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bertujuan untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya, peningkatan derajat harga diri, kebebasan berpikir dan melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak-hak asasi seperti yang dimiliki sesamanya.

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan internasional. PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat (Suharto,2005). Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal. Ia telah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Suharto, 2005). Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan yang tenteram lahir batin yang dapat dirasakan oleh masing-masing individu, golongan, ataupun masyarakat, mereka harus mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, baik materiil maupun spirituil tanpa adanya hambatan fisik, mental dan sosial.

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi (Suharto, 2005), yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

2. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi penyembuhan dan pemulihan (*kuratif/remedial* dan *rehabilitatif*).

- 1) Fungsi penyembuhan dapat bersifat represif artinya bersifat menekan agar masalah sosial yang timbul tidak makin parah dan tidak menjalar;
- 2) Fungsi pemulihan (*rehabilitatif*) terutama untuk menanamkan dan menumbuhkan fungsionalitas kembali dalam diri orang maupun anggota masyarakat;
- 3) Fungsi penyembuhan dan pemulihan bertujuan untuk meniadakan hambatan-hambatan atau masalah sosial yang ada.

b. Fungsi pencegahan (*preventif*).

Dalam hal ini meliputi langkah-langkah untuk mencegah agar jangan sampai timbul masalah sosial baru, juga langkah-langkah untuk memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat.

c. Fungsi pengembangan (*promotif, developmental*).

Untuk mengembangkan kemampuan orang maupun masyarakat agar dapat lebih meningkatkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup secara produktif.

d. Fungsi penunjang (*suportif*).

Fungsi ini menopang usaha-usaha lain agar dapat lebih berkembang. Meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan program-program lainnya seperti bidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, pertanian dan sebagainya. (Sumarnonugroho, 1991 : 43).

3. Kriteria Usaha Kesejahteraan Sosial

Menurut Wilensky dan Lebeaux mengemukakan lima kriteria untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang dapat disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial, yaitu :

a. *Formal Organization*

Usaha-usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu organisasi yang formal.

b. *Social Sponsorship and Accountability*

Usaha kesejahteraan sosial diselenggarakan oleh masyarakat atas dukungan masyarakat dan pelaksanaannya harus pula di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

c. *Absence of Profit Motive as Dominant Program Purpose*

Tidak ada motif mencari untung sebagai tujuan yang menonjol dalam sesuatu program.

d. *Functional Generalization : An Integrative View of Human Needs*

Memiliki fungsi yang bersifat umum yaitu ada kebulatan pandangan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia yang memerlukan bantuan dan perlu dipenuhi.

e. *Direct Concern with Human Consumption Needs*

Secara langsung berhubungan dengan konsumsi kebutuhan-kebutuhan manusia. (Sumarnonugroho, 1991 : 44).

Sedangkan menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Kesejahteraan Sosial yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tersebut juga diatur pula tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah di bidang kesejahteraan sosial.

Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial sesuai dengan pasal 25 UU No. 11 2009 meliputi:

- a. merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

- e. mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;
- f. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial;
- g. menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- k. mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- l. memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;
- m. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan
- n. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sedangkan Wewenang Pemerintah sesuai dengan pasal 26 UU No. 11 2009 dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;

- b. penetapan standar pelayanan minimum, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan negara lain, dan lembaga kesejahteraan sosial, baik nasional maupun internasional;
- e. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial;
- f. pendayagunaan dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Menurut (Moleong, 2000, h.6) Tujuan dari penelitian Deskriptif adalah menggambarkan hasil penelitian berupa kata-kata gambaran dan bukan angka-angka sehingga yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Bogdan & Taylor dalam Moleong (2001, h.3), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dipandang lebih mendukung dan memberi arti dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Nazir (2003, h.54) menambahkan bahwa :

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala/ keadaan dan tidak bermaksud menguji hipotesis

Memperhatikan tujuan penelitian yang terkait dengan topik yang sedang diteliti, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan tujuan agar peneliti dapat menggambarkan fenomena dan fakta yang terjadi di lokalisasi Kebobang Wonosari Kabupaten Malang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian atau tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian dalam penelitian adalah :

1. Gambaran kehidupan Wanita Tuna Susila di lokasi Kebobang Wonosari Kabupaten Malang dengan melihat aspek :
 - a. Asal dan umur Wanita Tuna Susila
 - b. Tingkat pendidikan
 - c. Penyebab terjun ke dunia prostitusi
2. Strategi rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang, yaitu :
 - a. Strategi rehabilitasi Wanita Tuna Susila adalah menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dengan melakukan upaya pembinaan mental, pembinaan keterampilan dan pemberian modal kepada para Wanita Tuna Susila.
 - b. Faktor – faktor pendukung rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokasi Kebobang Kabupaten Malang.
 - c. Faktor – faktor penghambat rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokasi Kebobang Kabupaten Malang.
3. Dampak rehabilitasi bagi para Wanita Tuna Susila di Lokasi Kebobang, ditinjau dari aspek peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan bantuan pemodal.

C. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat.

Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Malang hal ini karena kabupaten malang merupakan kabupaten besar di Jawa timur dan berdasar data dari Dinas Sosial Kabupaten Malang mempunyai jumlah lokalisasi yang banyak dan memiliki jumlah Wanita Tuna Susila yang besar, hal ini yang menyebabkan peneliti memilih lokasi di Kabupaten Malang.

Untuk situs penelitian peneliti memilih Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Lokalisasi Kebobang Wonosari Malang. Alasannya karena Dinas Sosial Kabupaten Malang tersebut sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang untuk menangani tetantang rehabilitasi Wanita Tuna Susila. Selain itu peneliti memilih lokalisasi Kebobang karena lokalisasi tersebut merupakan lokalisasi yang telah mendapat program rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang. Rehabilitasi sosial tersebut belum dapat dilakukan diseluruh lokalisasi di wilayah Kabupaten Malang karena minimnya alokasi dana Pemerintah Kabupaten Malang.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data diperoleh (Arikunto, 2002 : 107). Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat (Soemitro, 1998 : 10). Untuk mendapatkan data primer tersebut, penulis menggunakan cara, yaitu dengan :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai (Soemitro, 1988: 57). Wawancara ini dilakukan kepada Staf Dinas Sosial Kabupaten Malang yaitu Ibu Dra. Ratna Wahyuniati, Ibu Mujiati M,Si, Kepala Desa Kebobang dan empat orang Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang yaitu Ika, Tini, Susi, Ana yang semuanya adalah nama samaran.

b. Observasi

Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap (Arikunto, 1997:133).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (Soemitro, 1998 : 10). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari literatur buku – buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi - konsepsi, teori – teori yang berhubungan erat dengan permasalahan (Soemitro, 1998 : 98).

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 1998 : 236).

F. Instrumen Penelitian

Dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrumen berupa:

1. peneliti sendiri yang merupakan alat pengumpul data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data
2. pedoman wawancara atau *interview guide* yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara
3. perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan pikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Sebagai pelengkap dari catatan lapangan maka peneliti juga memanfaatkan *tape recorder*, agar mudah dalam mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah yang ada. Oleh karena itu data tersebut harus valid dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2002 : 135). Wawancara ini dilakukan kepada Staf Dinas Sosial Kabupaten Malang yaitu Ibu Dra. Ratna Wahyuniati, Ibu Mujiati M,Si, Kepala Desa Kebobang dan empat orang Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang yaitu Ika, Tini, Susi, Ana yang semuanya adalah nama samaran.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi obyek penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (1991, h.144) bahwa observasi sebagai pengumpul data diusahakan mengamati keadaan sesuatu yang wajar dan sebenarnya tanpa

ada usaha yang sengaja untuk melakukan atau mempengaruhi dan memanipulasinya. Observasi yang dilakukan peneliti yakni dengan mendatangi Lokalisasi Kebobang Wonosari Malang. Observasi dilakukan peneliti dilakukan sebelum dan pada saat wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2002 : 135).

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan jalan meneliti dan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip yang peneliti dapatkan dari Dinas Sosial Kabupaten Malang mengenai literatur, perundang-undangan dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan peneliti menghimpun dokumentasi dengan mengumpulkan foto-foto proses rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang

G. Analisa Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moleong, 2000: 103).

Menurut Milles dalam Rachman (1999:120), tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan, transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Cara mereduksinya dengan meringkas, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan menulis memo.

2. Penyajian data

Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan, bagan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

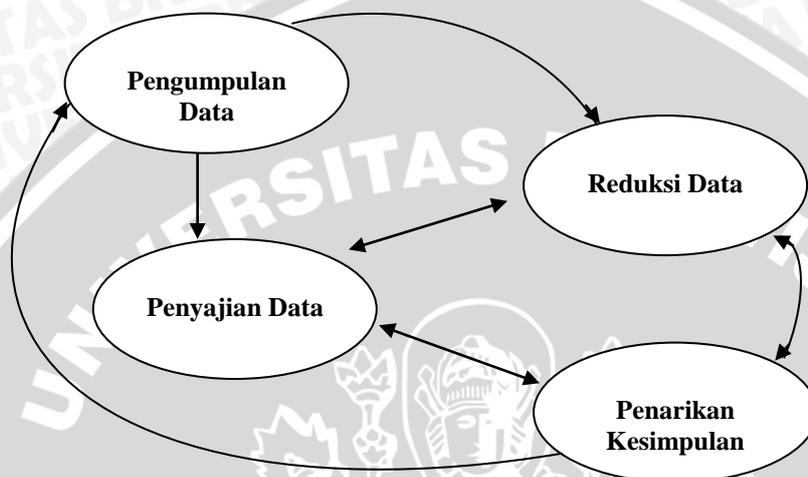
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, yang mungkin alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, tukar pikiran diantar teman sejawat, atau meminta respon atau komentar kepada responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kekokohnya, dan kecocokannya.

Tahapan analisis data kualitatif diatas dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 2.

Analisis Data Model Interaktif



Sumber : (Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 20):

Keempat komponen itu saling mempengaruhi dan mempunyai keterkaitan. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data.

Setelah direduksi kemudian disajikan data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu kesimpulan atau verifikasi. Pengumpulan Data Penyajian Data Kesimpulan/verifikasi Reduksi Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Malang

a. Letak Geografis Kabupaten Malang

Kabupaten Malang terletak antara $122^{\circ} 17' 10,90''$ sampai dengan $112^{\circ} 57' 00,00''$ bujur timur dan $7^{\circ} 44' 11''$ sampai dengan $8^{\circ} 26' 35''$ lintang selatan, dengan curah hujan antara 1600 mm sampai dengan 2200 mm per tahun. Curah hujancukup tinggi terjadi di beberapa kecamatan seperti Pujon, Ngantang, Lawang, Pakis, Donomulyo sedangkan untuk kecamatan-kecamatan lainnya curah hujan tidak begitu tinggi dan umumnya merata sepanjang tahun.

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Jombang

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri

Wilayah Kabupaten Malang terletak dibagian Selatan Propinsi Jawa Timur sehingga mempunyai potensi laut dan pantai dengan keadaan topografi yang bervariasi tetapi secara umum mempunyai hawa sejuk, karena pada musim hujan suhu berkisar antara $12^{\circ} C$ sampai dengan $18^{\circ} C$ dan pada musim kemarau

suhunya berkisar antara 18° C sampai dengan 24° C. Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan yaitu pegunungan Tengger yang memiliki dua gunung terkenal, yakni Gunung Bromo dan Gunung Semeru (3676 m) yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa.

b. Luas Wilayah

Berdasarkan data kependudukan pada tahun 2009 Kabupaten Malang mempunyai luas wilayah adalah 353.486,00 Ha atau 3.534,86 Km², yang penggunaannya terdiri dari pemukiman, sawah, perkebunan, hutan dan lain-lain.

Dengan perincian pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 2
Perincian Wilayah Kabupaten Malang
Tahun 2007-2009

No.	Jenis Lahan	Luas Lahan (Ha.)
1.	Permukiman/ Kawasan Terbangun	79,610.35
2.	Industri	559.04
3.	Sawah	
	- Irigasi	36,279.57
	- Non Irigasi	10,169.00
4.	Pertanian Tanah Kering	84,076.00
5.	Perkebunan	
	- Perkebunan Rakyat	880.34
	- Perkebunan Besar	21,162.61
6.	Hutan	
	- Sejenis	17,406.93
	- Belukar	10,198.62
	- Lebat	73,458.06
7.	Rawa/ Danau Waduk	718.69
8.	Tambak /Kolam	131.55
9.	Padang rumput/ Tanak kosong	1,042.59
10.	Tanah Tandus/ Tanah Rusak	5,431.77
11.	Tambang galian C	898.31
12.	Lain-lain	11,461.70
	Jumlah	353,486.00

Sumber : BPN Kabupaten Malang

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat sebagian besar wilayah kabupaten Malang adalah pertanian tanah kering, yang membuat kabupaten Malang tidak banyak bangunan perkantoran. Kondisi lahan di Kabupaten Malang bagian utara relatif subur, sementara di sebelah selatan relatif kurang subur. Masyarakat Kabupaten Malang umumnya bertani, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan dan sebagian lainnya berkembang sebagai masyarakat industri.

c. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Malang menurut BPS Kabupaten Malang tahun 2009 sebanyak 2.475.880 jiwa atau mengalami pertumbuhan 24.555 jiwa atau rata-rata naik 1,00% setiap tahun dengan meningkat kepadatan sebesar 700 jiwa per KM². Untuk lebih jelasnya pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Jumlah Penduduk
Di Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2007-2009

No	Tahun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	2007	1.221.001	1.180.623	2.401.624
2.	2008	1.218.738	1.232.587	2.451.325
3.	2009	1.231.268	1.244.612	2.475.880

Sumber : BPS Kabupaten Malang

Berdasarkan tabel 3 di atas jumlah penduduk di wilayah kabupaten Malang yang tersebar di 33 kecamatan pada tahun 2009 adalah penduduk laki-laki berjumlah 49,73 % lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang berjumlah 50,27%

Data kependudukan terbaru yang diperoleh dari media masa malang pada tahun 2010 jumlah penduduk di Kabupaten Malang bertambah sebanyak 258.495 jiwa dari tahun 2009. Dengan 1.367.188 jiwa wanita dan 1.367.187 jiwa laki-laki dengan demikian jumlah wanita lebih banyak daripada penduduk laki-laki walaupun selisihnya hanya 1 orang. Ada 19 kecamatan yang jumlah wanitanya lebih banyak dari jumlah laki-laknya. Bila ada satu wanita saja yang meninggal maka jumlah antara pria dan wanitaimbang. Dari data dinas kependudukan dan catatan sipil itu juga dapat dilihat kecamatan yang paling banyak dan sedikit penduduknya. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Singosari dengan 174.055 jiwa. Dengan jumlah pria 87.989 jiwa dan wanita 86.066 jiwa. (Radar Malang, "Pria wanita selisih satu orang" hal. 48, tanggal 18 Juni 2010)

Dilihat dari penduduk yang semakin bertambah ini Kabupaten Malang harus lebih menekan angka pertumbuhan secara dini, agar tidak melampaui kuota yang dimiliki Kabupaten Malang dalam menampung penduduk.

d. Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan

Wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang terbagi atas 33 kecamatan, dengan perincian pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4

Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan

No.	Keterangan	Jumlah
1	Kecamatan	33
2	Kelurahan	12
3	Desa	378
4	RW	3.217
5	RT	14.718

Sumber : Bagian Tapendes Kabupaten Malang

Berdasarkan tabel 4 di atas terlihat bahwa wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan dan 378 desa. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3 berikut :

Gambar 3

Peta Wilayah Kabupaten Malang



Sumber: www.malang.kab.go.id

2. Gambaran Umum Desa Kebobang

Desa Kebobang berada di wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Jarak tempuh desa Kebobang dengan jantung kecamatan Wonosari sekitar 7 km dan untuk jarak ke Ibu kota Kabupaten Malang sekitar 31 km. Desa kebobang mempunyai hawa yang sejuk karena desa tersebut berada di bawah atau di kaki gunung Kawi yang di tempat tersebut juga terdapat tempat religi yang bernama bukit do'a yang sering didatangi oleh para peziarah dari dalam kabupaten Malang ataupun luar Kabupaten Malang.

Desa Kebobang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wonosari dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan desa Wonosari Kecamatan Wonosari

Sebelah timur : berbatasan dengan desa Ngajum Kecamatan Ngajum

Sebelah selatan : berbatasan dengan desa Plaosan Kecamatan Wonosari

Sebelah barat : berbatasan dengan desa Sumbertempur Kecamatan Wonosari

Wilayah desa Kebobang terletak dibagian Selatan Kabupaten Malang.

Sebagian besar penduduk desa Kebobang adalah petani karena wilayah tersebut sebagian besar adalah perkebunan dan persawahan.

1. Luas Wilayah

Berdasarkan data kependudukan desa pada tahun 2010 desa Kebobang mempunyai luas wilayah adalah 1078 Ha atau, yang penggunaannya terdiri dari pemukiman, sawah, perkebunan, hutan, kuburan dan lain-lain.

Dengan perincian pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Perincian Wilayah Desa Kebobang
Tahun 2010

No.	Jenis Lahan	Luas Lahan (Ha.)
1.	Luas Pemukiman	1,4 ha
2.	Luas Persawahan	75,9 ha
3.	Luas Perkebunan	456,1 ha
4.	Luas Kuburan	1,4 ha
5.	Luas Pekarangan	300 ha
6.	Luas Taman	ha
7.	Luar Perkantoran	0,9 ha
8.	Luas Prasarana lainnya	3,3 ha
	Jumlah	1078 ha

Sumber : Pemerintahan desa Kebobang

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat sebagian besar wilayah Desa Kebobang adalah pertanian tanah kering, yang membuat desa tersebut tidak banyak bangunan perkantoran. Masyarakat desa Kebobang umumnya bertani karena desa Kebobang mempunyai wilayah perkebunan yang relatif luas dan mempunyai beberapa hasil pertanian unggulan.

2. Penduduk

Jumlah penduduk desa Kebobang menurut data pemerintahan desa pada tahun 2010 adalah sebai berikut :

Tabel 6
Jumlah Penduduk Desa Kebobang
Tahun 2010

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah laki-laki	4064 jiwa
2.	Jumlah Perempuan	4955 jiwa
3.	Jumlah KK	2592 KK
	Jumlah	9019 jiwa

Sumber : Pemerintahan desa Kebobang

Karena sebagian besar wilayah desa Kebobang adalah perkebunan maka mata pencaharian sebagian penduduknya juga sebagai petani, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Tabel 7
Perincian Mata Pencaharian Warga Desa Kebobang
Tahun 2010

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	1523 Orang	1572 Orang
2	Buruh tani	459 Orang	673 Orang
3	Buruh migran perempuan	Orang	238 Orang
4	Buruh migran laki-laki	281 Orang	0 Orang
5	Pegawai negeri sipil	27 Orang	42 Orang
6	pengrajin industri rumah tangga	156 Orang	186 Orang
7	Pedagang keliling	42 Orang	38 Orang
8	Peternak	64 Orang	17 Orang
9	Pembantu rumah tangga	2 Orang	27 Orang
10	TNI	4 Orang	0 Orang
11	POLRI	6 Orang	0 Orang
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	17 Orang	21 Orang
13	Pengusaha kecil menengah	26 Orang	11 Orang
14	Sopir	38 Orang	0 Orang
15	Tukang batu/kayu	21 Orang	0 Orang
Jumlah mata pencaharian pokok		2705 orang	2837 Orang

Sumber : Pemerintahan desa Kebobang

Sebagaimana tabel 7 di atas sebagian besar penduduk desa kebobang adalah petani dan buruh tani. Tetapi selain itu di desa tersebut juga banyak masyarakat desanya yang menggantungkan pekerjaan menjadi pengrajin industri rumah tangga dan hasil dari pada kerajinannya sudah di pasarkan sampai luar Kabupaten Malang.

c. Lokalisasi Kebobang

Lokalisasi Kebobang merupakan satu dari lima lokalisasi di kabupaten Malang yang sampai saat ini masih bertahan. Di tahun 2010 terdapat enam lokalisasi setelah pada bulan November 2010 lalu lokalisasi Buk tape ditutup oleh pemerintah daerah setelah adanya kesepakatan antara pemerintah dengan penghuni lokalisasi setempat yaitu para mucikari dan Pekerja Seks yang ada. Kelima lokalisasi tersebut adalah lokalisasi Slorok Kecamatan Kromengan sebanyak 65 orang, lokalisasi Suko Kecamatan Sumberpucung 112 orang, lokalisasi Kebobang Kecamatan Wonosari sebanyak 66 orang, Kalikudu Kecamatan Pujon sebanyak 25 orang dan Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi sebanyak 70 orang. (Sumber: Pemkab Malang bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2011)

Lokalisasi Kebobang berada di wilayah Rt. 01 Rw. 01 desa Kebobang, dan jika ditelusuri sejarahnya menurut hasil wawancara dengan salah satu Pekerja Seks yang ada, lokalisasi Kebobang berdiri mulai tahun 1978.

“Lokalisasi Kebobang ini ada sejak tahun 1978, dulunya tidak berkumpul dalam wisma-wisma seperti ini. Dahulu hanya ada dua rumah yang itupun jaraknya berjauhan setelah beberapa tahun jumlah pelangganpun meningkat dan pada akhirnya dibuatkan tempat seperti ini mas, setelah itu jumlah wanita yang bekerja disini juga sedikit demi sedikit meningkat” (wawancara dengan Tini(nama samaran), Pekerja Seks di Lokalisasi Kebobang, 02 Juli 2011)

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa sejarah berdirinya lokalisasi kebobang dimulai tahun 1978 yang pada waktu itu hanya dua rumah yang menjajakan kebutuhan biologis, karena setelah itu jumlah pelanggannya semakin bertambah maka para PS pada waktu itu diberikan suatu tempat yaitu berbentuk wisma-wisma. Pekerja Seks yang bekerja di tempat itu dahulunya

hanya berasal dari dalam kabupaten Malang tetapi setelah tempat itu ramai oleh pelanggan pekerja seks yang berasal dari luar wilayah Malang banyak yang datang.

Dari data Dinas Sosial di tahun 2011 jumlah wisma yang ada di lokasi Kebobang sebanyak 15 wisma yang di dalamnya terdapat mucikari dan beberapa PS. Sebagian besar pekerja seks yang berada di lokasi tersebut berasal dari luar kabupaten Malang dan sisanya berasal dari kecamatan-kecamatan di sekitar lokasi Kebobang.

Tabel 8
Jumlah wisma dan asal Pekerja Seks di Lokasi Kebobang
Tahun 2011

No	Nama Wisma	Jumlah Mucikari	Jumlah WTS	Asal
1	Flamboyan	1	2 4	Kab. Malang Luar Malang
2	Arumdalu	1	1 3	Kab. Malang Luar Malang
3	Dewandaru	1	6	Luar Malang
4	Dahlia	1	5	Luar Malang
5	Anggrek Bulan	1	3 1	Kab. Malang Luar Malang
6	Melati	1	4 2	Kab. Malang Luar Malang
7	Bougenvile	1	2	Luar Malang
8	Locari	1	3 2	Kab. Malang Luar Malang
9	Kenanga	1	3 2	Kab. Malang Luar Malang
10	Mawar	1	3 2	Kab. Malang Luar Malang
11	Sri Rejeki	1	1 3	Kab. Malang Luar Malang
12	Sakura	1	2 1	Kab. Malang Luar Malang
13	Edelwise		1 1	Kab. Malang Luar Malang

14	Nusa Indah	1	1 2	Kab. Malang Luar Malang
15	Gladiol	1	2 4	Kab. Malang Luar Malang
Jumlah		14	66	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Malang 2011

Melihat tabel 8 di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua pekerja seks yang ada di lokalisasi tersebut berasal dari Kabupaten Malang tetapi justru sebanyak 38 orang berasal dari luar Kabupaten.

Menanggapi hal tersebut ketika peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa setempat, beliau tidak dapat melakukan banyak hal karena sampai hari ini hanya terdapat Instruksi Bupati tahun 2002 yang Implementasinya pun belum berdampak signifikan dalam penanggulangan Prostitusi di Kabupaten Malang.

“ Dahulu Bupati Malang Bapak Sujud Pribadi sudah mengeluarkan Instruksi Bupati tentang Pelarangan kegiatan prostitusi di wilayah Malang tetapi sampai sekarang Instruksi tersebut belum banyak berdampak bagi penanggulangan kegiatan prostitusi dan saya kira dengan adanya lokalisasi seperti ini justru dalam segi pemantauan akan semakin sistematis, yaitu pemantauan kesehatan secara rutin oleh Dinas Kesehatan atau LSM yang menanganinya” (wawancara dengan Mujiati, Kepala Desa Kebobang, 27 Juni 2011)

Beliaupun menambahkan bahwa dari segi agama kegiatan tersebut sudah jelas haram, tetapi ketika dibenturkan dengan urusan perut kemudian ditambah tidak jelasnya Implementasi kebijakan yang ada maka kegiatan yang berada di dalam lokalisasi tersebut bisa menjadi benar. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama tambahnya.

Dilokalisasi Kebobang tersebut setiap dua bulan sekali mendapatkan pemeriksaan gratis dari Puskesmas dan LSM Paramitra untuk memantau

kesehatan para orang-orang risti (resiko tinggi) baik para mucikari, PS, sampai tukang ojek akan penyebaran virus HIV/Aids maupun Infeksi Menular Seksual Lainnya.

“Ketika mereka berada di dalam lokalisasi di lain sisi sangat membantu pemantauan kesehatan dari menularnya virus HIV Aids dan penyakit menular seksual. Selain itu tidak jarang Lokalisasi Kebobang mendapat bantuan dari dinas-dinas yang ada, bantuan tersebut berbentuk bantuan pembinaan keterampilan, pembinaan moral, bantuan dana dan lain sebagainya” (wawancara dengan Mujiati, Kepala desa Kebobang, 29 Juni 2011)

Dalam Lokalisasi Kebobang terdapat sebuah kelompok kerja yang berfungsi sebagai media pengawasan dan penyuluhan untuk para Pekerja Seks dan mucikari yang ada. Anggota dari kelompok kerja tersebut adalah mulai dari pejabat teras Desa Kebobang, Babinsa dan perwakilan mucikari dan Pekerja Seks. Dalam kelompok kerja tersebut terdapat 4 seksi dan mempunyai fungsi masing-masing, seksi-seksi tersebut adalah :

1. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan :
 - a. Menyampaikan informasi tentang IMS, HIV/AIDS dan Kesehatan Reproduksi
 - b. Pembagian Media Penyuluhan
 - c. Mengorganisir pertemuan kader
 - d. Memantau dan memelihara papan informasi HIV/AIDS
2. Seksi Pemeriksaan :
 - a. Pemdataan PS
 - b. Mengetahui Jumlah PS yang diperiksa
 - c. Pendampingan PS waktu pemeriksaan

- d. Mengkoordinir pemeriksaan rutin
3. Seksi Akses Kondom dan Pelicin :
 - a. Pembentukan dan pengadaan outlet kondom dan pelicin
 - b. Pendistribusian kondom pada PS dan tamu
4. Seksi Pemberdayaan Kader :
 - a. Mamantau pertemuan kader
 - b. Memantau keberadaan kader

3. Gambaran Umum Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial. Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malang dipimpin oleh Kepala Dinas yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Malang

Sebagai suatu organisasi pemerintahan, Dinas Sosial Kabupaten Malang memiliki visi dan misi sebagai acuan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya agar tujuannya tercapai. Visi merupakan suatu pandangan organisasi yang jauh ke depan yaitu kemana organisasi tersebut akan dibawa dan dikembangkan agar dapat mempertahankan eksistensinya. Sebuah visi dapat menjadi motivasi suatu organisasi untuk selalu inovatif dan kreatif.

Misi merupakan rumusan yang bersifat luas dan bersifat jangka panjang mengenai maksud dan sifat dari sebuah organisasi. Misi mengandung filosofi publik, mensyaratkan kualitas yang ingin diberikan serta mencerminkan konsep diri pemerintah. Misi juga merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Malang yang terdapat dalam Rencana Strategi (Restra) organisasi/ instansi adalah sebagai berikut:

1. Visi Dinas Sosial Kabupaten Malang

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui usaha bersama pemerintah dan masyarakat

2. Misi Dinas Sosial Kabupaten Malang

- a. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup masyarakat untuk mencegah, mengendalikan dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan sumberdaya manusia (SDM) dan kualitas kelembagaan organisasi sosial.
- b. Menggalang potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta meningkatkan partisipasi sosial masyarakat.
- c. Mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial.
- d. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan transparan.

b. Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Malang

1. Terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat
2. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur
3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Terentasnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5. Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial serta kesetiakawanan sosial masyarakat.
6. Terwujudnya peran serta dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
7. Terlestarikan, tertanam dan teramalkannya nilai-nilai kepahlwanan, keperintisan dan keuangan.

c. Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Malang

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan
2. Meningkatkan perluasan jangkauan pelayanan sosial kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial
5. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial

d. Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Malang

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya

f. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Malang

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan
2. Perencanaan strategis pada Dinas Sosial
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial
5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang sosial
6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang sosial
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial
8. Pembinaan UPTD
9. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Sosial
10. Pengkoordinasian dalam rangka meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat, usaha sosial lainnya dengan instansi terkait dan lembaga masyarakat

11. Pembinaan dan bimbingan teknis serta pengawasan dalam rangka pelayanan terhadap usaha sosial meliputi Panti Asuhan, Panti Rehabilitasi Sosial dan lain-lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan kesejahteraan sosial masyarakat
12. Pelaksanaan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
13. Penyiapan rekomendasi proses pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial serta keagamaan
14. Pembuatan rekomendasi dan proses perizinan pendirian panti sosial dan adopsi anak
15. Penyelenggaraan usaha preventif, kuratif dan rehabilitasi serta promotif dalam penanganan kesejahteraan sosial

f. Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Malang

Sumber daya aparatur merupakan komponen yang penting dari suatu organisasi. Oleh karena itu sumber daya aparatur suatu organisasi mempunyai pengaruh terhadap berjalannya suatu organisasi. Sumber daya aparatur yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Malang terdiri dari seorang Kepala Dinas, seorang sekretaris, empat orang Kepala Bidang, tiga orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Seksi, 19 orang staf dan lima orang Tenaga Harian Lepas. Penjelasan mengenai tugas dari masing-masing sumber daya aparatur adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Perencanaan

c. Bidang Bina Swadaya Sosial

- 1) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
- 2) Seksi Bina Kesejahteraan Anak, Remaja dan Karang taruna
- 3) Seksi Bina Kesejahteraan Keluarga dan lanjut Usia m

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

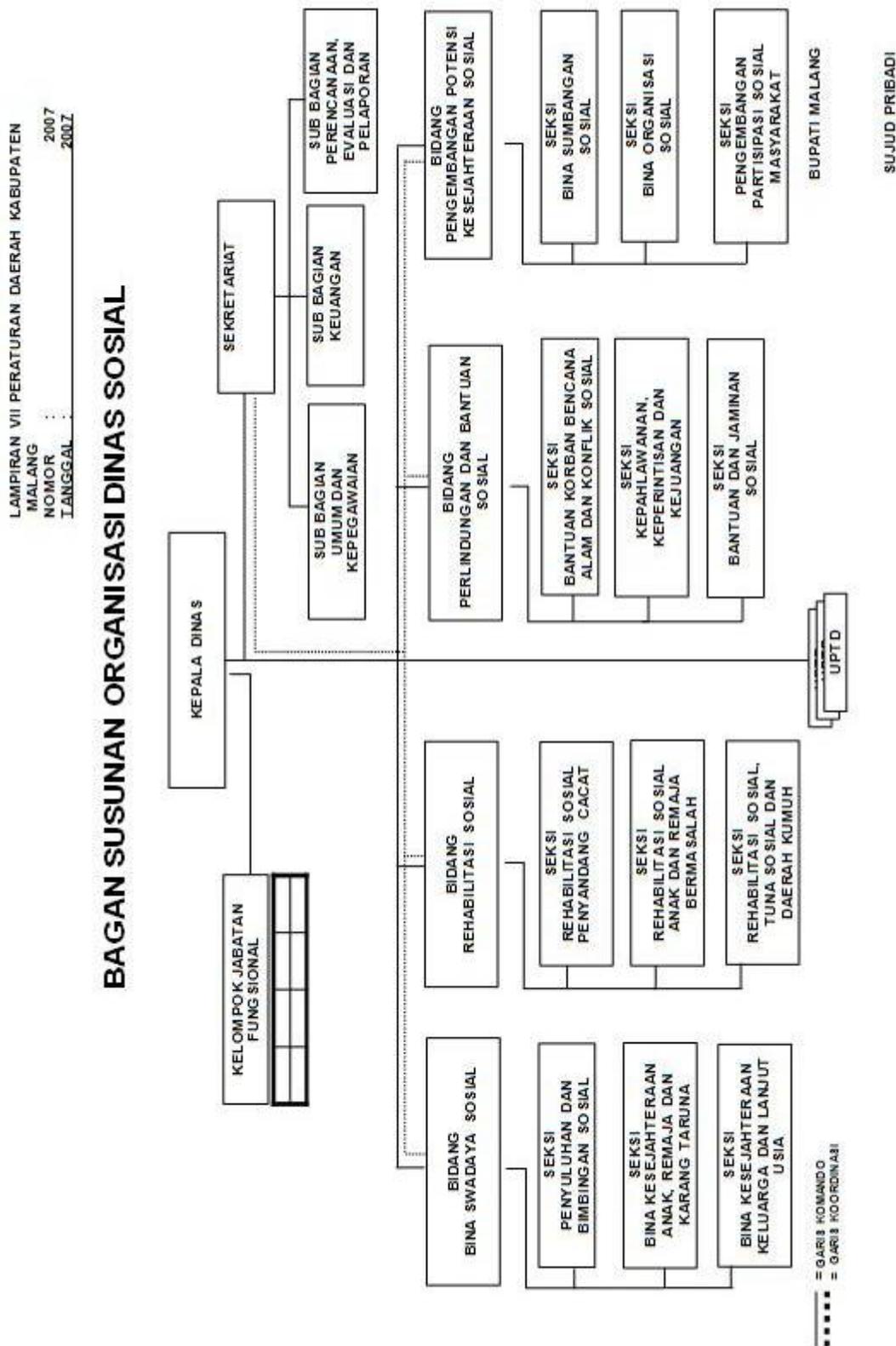
- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Bermasalah
- 3) Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna sosial dan Daerah Kumuh

e. Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial

- 1) Seksi Bantuan Korban bencana alam dan Konflik social
- 2) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
- 3) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Malang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan bidang-bidang yang dibantu oleh seksi-seksi yang ada. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4 berikut :

Gambar 4. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Malang



4. Gambaran Kehidupan Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang

a. Daerah asal dan umur Wanita Tuna Susila

Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten besar di Indonesia dan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang merupakan pusat segala aktifitas ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Sebagai kabupaten besar, Kabupaten Malang mengalami fenomena semakin marak pula kegiatan prostitusi yang ada di wilayah kabupaten tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang sebanyak 335 yang tersebar di 5 lokalisasi di Kabupaten Malang, yaitu lokalisasi Suko, Slorok, Kalikidu, Gondang legi dan Kebobang.

Jumlah Wanita Tuna Susila atau yang kerap dipanggil PS (Pekerja Seks) di lokalisasi Kebobang menurut data yang diperoleh peneliti berjumlah 66 orang, mereka tidak hanya berasal dari Kabupaten Malang tetapi sebagian juga berasal dari luar Kabupaten Malang. Berikut peneliti melakukan wawancara kepada empat PS yang juga mereka mendapatkan Pembinaan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Malang :

“PS yang bekerja di Lokalisasi Kebobang ini tidak hanya berasal dari Kabupaten Malang tetapi ada juga yang berasal dari luar Kabupaten Malang.”
(wawancara dengan Bagong, Ketua Pokja Lokalisasi Kebobang, 02 Juli 2011, pukul 10.35 WIB)

“Saya berasal dari Singosari mas.” (Wawancara dengan Ika(nama samran), 23 Tahun, Pekerja Seks di Lokalisasi Kebobang, 2 Juli 2011, pukul 09.30 WIB)

“Ibu berasal dari Slorok Kromengan.” (Wawancara dengan Tini(nama samaran), 44 tahun, Pekerja Seks di lokasi Kebobang, 2 Juli 2011, pukul 10.15 WIB)

“Saya berasal dari Kecamatan Ngajum.” (Wawancara dengan Susi(nama samaran), 40 tahun, Pekerja Seks di Lokasi Kebobang, 5 Juli 2011, pukul 09.00)

“Saya berasal dari Kebobang aja mas.” (Wawancara dengan Ana(nama samaran), 26 tahun, Pekerja Seks di Lokasi Kebobang, 5 Juli 2011, pukul 10.00)

Berdasarkan wawancara di atas peserta pembinaan sosial berasal dari Kabupaten Malang, meskipun Pekerja Seks yang berada di Lokasi Kebobang juga ada yang berasal dari luar Kabupaten Malang. Menurut petugas pelaksana dari Dinas Sosial hal ini dikarenakan alokasi anggaran pembinaan memang hanya difokuskan untuk Pekerja Seks yang berasal dari wilayah Kabupaten Malang.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pekerjaan yang dijalani oleh seseorang. Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang minim maka kebanyakan cenderung mendapat pekerjaan yang kurang layak pula. Dalam wawancara ini peneliti mencoba mengetahui tingkat pendidikan para Wanita Tuna Susila di Lokasi Kebobang khususnya mereka yang mendapat pembinaan dari Dinas Sosial.

“Sekolah terakhir saya SMP mas.” (Wawancara dengan Ika(nama samran), 23 Tahun, Pekerja Seks di Lokalisasi Kebobang, 2 Juli 2011, pukul 09.40 WIB)

“Saya hanya lulusan SD.” (Wawancara dengan Tini(nama samaran), 44 tahun, Pekerja Seks di lokalisasi Kebobang, 2 Juli 2011, pukul 10.20 WIB)

“Sekolah saya hanya sampai kelas 3 SD.” (Wawancara dengan Susi(nama samaran), 40 tahun, Pekerja Seks di Lokalisasi Kebobang, 5 Juli 2011, pukul 09.15)

“Saya lulus SD mas.” (Wawancara dengan Ana(nama samaran), 26 tahun, Pekerja Seks di Lokalisasi Kebobang, 5 Juli 2011, pukul 10.10)

Berdasarkan sampel hasil wawancara di atas para Pekerja Seks yang berada di Lokalisasi Kebobang yang mengikuti program pembinaan sosial sebagian besar hanya dapat mendapatkan pendidikan terakhir SD. Hal ini kemudian berdampak pada pekerjaan yang mereka jalani saat ini. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki.

c. Penyebab terjun ke dunia prostitusi

Ada beberapa alasan mengapa seseorang menjadi Wanita Tuna Susila. Hal ini seperti yang diutarakan PS yang ditemui peneliti di Lokalisasi Kebobang.

“Kalau ditanya mengapa, yaa karena untuk hidup mas saya menjalani pekerjaan seperti ini, saya pun hanya lulusan SMP mau cari kerja ya susah jadi bekerja di tempat ini pun juga terpaksa sebenarnya.” (Wawancara dengan Ika(nama samran), 23 Tahun, Pekerja Seks di Lokalisasi Kebobang, 2 Juli 2011, pukul 09.40 WIB)

“Saya bekerja di tempat ini sudah hampir 20 tahun, ya karena untuk mencari kerja mas. Hampir semua PS disini janda jadi mereka harus bekerja seperti ini untuk mencukupi kebutuhan. Kerja di tempat ini enak tapi kalau sudah sepi mas, dua hari ya saya nganggur gini, kerjaan cuma ngobrol ma temen-temen atau bersih-bersih rumah. Untuk masalah hasil ya kadang lumayan tapi kalau sepi ya sehari ga dapet juga biasa. Tetapi enaknyanya disini tidak ada potongan pajak jadi kalau sudah dapat ya buat sendiri gitu.” (Wawancara dengan Tini(nama samaran), 44 tahun, Pekerja Seks di lokasi Kebobang, 2 Juli 2011, pukul 10.23 WIB)

“Alasan milih pekerjaan ini ya karena untuk mencari makan dan untuk biaya sekolah anak mas. Ini anak saya sudah kelas 2 SMP jadi perlu biaya yang tidak sedikit. Dan sebentar lagi kan ini bulan puasa jadi semua PS yang bekerja disini harus libur, dan biasanya tiga hari menjelang puasa sudah ada surat edaran dari Kabupaten mas.” (Wawancara dengan Susi(nama samaran), 40 tahun, Pekerja Seks di Lokasi Kebobang, 5 Juli 2011, pukul 09.20)

“Saya bekerja disini untuk mencukupi kebutuhan mas, mau cari kerja juga bingung kerja apa. Ya kemarin ada pembinaan dari Dinas Sosial itu sangat membantu saya dan teman-teman.” (Wawancara dengan Ana(nama samaran), 26 tahun, Pekerja Seks di Lokasi Kebobang, 5 Juli 2011, pukul 10.10)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alasan utama mereka terjun ke dunia prostitusi adalah permasalahan ekonomi, selain itu sulitnya mendapat lapangan pekerjaan karena sebagian besar para PS di Lokasi Kebobang hanya memiliki pendidikan yang minim. Pada dasarnya di dunia ini tidak ada wanita yang ingin menjadi seorang Tuna Susila, tetapi keadaan ekonomi yang kemudian memaksa mereka terjun ke dunia tersebut. Berdasarkan hasil penelitian banyak dari mereka juga mempunyai pendidikan yang rendah ditambah minimnya keterampilan yang dimiliki, berangkat dari masalah itulah hanya dengan menjual diri jalan yang dapat mereka tempuh.

5. Strategi Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang

Masalah sosial tentang kegiatan prostitusi dalam masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Di satu sisi semua sepakat bahwa prostitusi merupakan suatu hal yang haram, tetapi sebagian orang mempunyai pedapat bahwa prostitusi merupakan kebutuhan dan suatu hal yang wajar.

Di kabupaten Malang terdapat lima lokalisasi yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada yaitu kecamatan Sumber Pucung, Wonosari, Kromengan, Pujon dan Gondanglegi. Dan sampai sekarang lokalisasi-lokalisasi tersebut masih sangat ramai dikunjungi oleh para pelanggan termasuk lokalisasi Kebobang yang berada di kecamatan Wonosari tempat penulis melakukan penelitian. Melihat hal tersebut sangatlah ironis karena sebenarnya pada tahun 2002 Bupati Malang telah mengeluarkan Instruksi Bupati Malang Nomor 3 tahun 2002 tentang Larangan Operasional bagi Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Malang.

Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh camat di wilayah Kabupaten Malang untuk :

1. Melarang kegiatan operasional Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) di wilayahnya
2. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait segala bentuk langkah-langkah yang diambil dalam rangka penanggulangan dan rehabilitasi para Pekerja Seks Komersial (PSK), agar dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat

3. Melaporkan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan adanya operasional Pekerja Seks Komersial (PSK) di wilayahnya Kepada Bupati.

Tetapi implementasi dari pada kebijakan tersebut di lapangan tidak dihiraukan oleh para mucikari dan para Wanita Tuna Susila. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya lokalisasi tempat transaksi akan lebih tertata rapi dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lain.

“Lha mending mereka di sini mas, dari pada mereka berkeliaran setiap malem di jalan-jalan yang tidak jelas, toh mereka bekerja juga untuk cari makan dan menyekolahkan anaknya, jadi saya kira tidak salahlah walaupun salah mengapa kok sampai sekarang lokasi ini masih ada. Selain itu mereka di sini juga tidak pernah mengganggu masyarakat sekitar dan masyarakat disini juga tidak pernah protes.” (wawancara dengan Pak Bagong, Pengurus Pokja Lokalisasi Kebobang Kecamatan Wonosari, Dinas Sosial Kabupaten Malang, 2 Juli 2011 , Pukul 12.00 WIB)

Kondisi di atas membuktikan bahwa Instruksi Bupati pada waktu itu belum mengikat secara tegas kepada para pelaku kegiatan prostitusi dan terbukti sudah 9 tahun sejak di Instruksi tersebut dikeluarkan tidak ada satupun lokalisasi yang ditutup. Kecuali pada tahun 2010 lalu ada satu lokalisasi yang sudah ditutup yaitu lokalisasi buk tape yang berada di kecamatan kepanjen. Lokalisasi itupun ditutup bukan karena Instruksi Bupati tetapi karena adanya perjanjian secara terbuka antara penghuni lokalisasi baik mucikari maupun Pekerja Seks dengan Pemerintah.

Melihat semakin maraknya kegiatan prostitusi Dinas Sosial Kabupaten Malang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi melakukan program rehabilitasi kepada para Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang khususnya di lokalisasi Kebobang Kecamatan Wonosari. Program rehabilitasi ini menjadi

kewenangan Dinas Sosial Kabupaten karena dalam Kebijakan Rehabilitasi sosial tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial. Kebijakan ini menjadi tanggungjawab dari Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang yang memiliki tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang Rehabilitasi sosial. Sedangkan salah satu fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan daerah kumuh.

Tugas dari Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna sosial dan Daerah Kumuh sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial yaitu:

1. Menyiapkan bahan pembinaan dan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan daerah kumuh
2. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi sosial Tuna Sosial (tuna susila gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, bekas narapidana, pengidap HIV/AIDS) dan daerah kumuh
3. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan bimbingan sosial kepada tuna sosial dan daerah kumuh
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan daerah kumuh
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan daerah kumuh.

Untuk program rehabilitasi Wanita Tuna Susila di lokasi Kebong dilakukan dalam waktu 20 hari yang bertempat di lahan parkir lokasi

Kebobang yang ditata sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang layak digunakan untuk belajar.

“Program bimbingan ini dilakukan dalam waktu 20 hari, para teman-teman Wanita Tuna Susila mendapatkan bimbingan motivasi, pembinaan moral dan pengembangan bakat yang mereka punya dengan memberikan keterampilan-keterampilan seperti salon kecantikan, pembuatan pernik-pernik perhiasan dan kerajinan-kerajinan yang nantinya siap untuk dipasarkan. Dan kami menyiapkan para pembimbing ini dari kalangan-kalangan profesional dan yang mempunyai sertifikat karena agar program yang begitu singkat ini dapat berjalan dengan baik dan efektif yang nantinya juga berdampak positif bagi mereka” (Wawancara dengan Ratna Wahyuniati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Daerah Kumuh, Dinas Sosial Kabupaten Malang, 4 Juli 2011, Pukul 10.00 WIB)

Program rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial tersebut menekankan dua fokus yaitu pembinaan moral atau sosial dan pembinaan keterampilan. Pembinaan moral dan budi pekerti merupakan pembinaan yang sangat baik, dan merupakan suatu pembinaan dasar yang utama bagi seluruh makhluk dalam masyarakat. Pembinaan moral dan budi pekerti untuk melatih perbuatan, ucapan, dan pikiran agar selalu benar. Bertujuan agar kita selalu berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari sesuatu yang sudah dilarang.

Didalam pembinaan moral, para Wanita Tuna Susila ditekankan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Sebagai contoh dalam pembinaan moral, mereka dilarang untuk mencuri, membunuh, makan makanan haram, dsb. Dan harapannya dengan adanya program pembinaan ini mereka akan memiliki kesadaran sejati, kesadaran yang muncul dari dalam hatinya. Ketika kesadaran sejati tersebut sudah muncul dalam diri mereka, seberat apapun godaan yang datang baik dari godaan uang dan nafsu akan dapat mereka tolak.

Dalam program tersebut para Wanita Tuna Susila mendapatkan pembinaan keterampilan-keterampilan yang diberikan para instruktur. Dengan keterampilan yang mereka miliki harapannya para Wanita Tuna Susila akan dapat memiliki mata pencaharian yang akan menopang kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para WTS bahwa sebagian besar dari mereka terjun ke dunia prostitusi dikarenakan oleh tuntutan akan ekonomi.

Kegagalan para Wanita Tuna Susila untuk hidup normal lebih disebabkan karena mereka tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang mampu bersaing sehingga mereka sangat sulit untuk meninggalkan dunia prostitusi yang sudah mereka lakukan. Oleh karena itu, usaha Pemerintah Kabupaten Malang melakukan kegiatan bimbingan sosial dan ketrampilan merupakan usaha membekali mereka agar mampu menciptakan lapangan kerja atau setidaknya mau bekerja pada orang lain sebagai usaha mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya sasaran ini akan menciptakan kondisi kehidupan mereka yang lebih sejahtera daripada sebelumnya.

Selain itu dengan keterampilan yang mereka miliki akan dapat mengembalikan harkat sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.

a. Strategi Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang

Ada beberapa tahapan dalam kegiatan Program rehabilitasi Wanita Tuna Susila. Hal ini seperti hasil wawancara dengan pejabat Dinas Sosial Kabupaten Malang sebagai berikut:

“Program rehabilitasi sosial dan keterampilan dilakukan selama 20 hari. Pembagiannya 25% untuk bimbingan teori dan sisanya untuk latihan keterampilan. Sedangkan pesertanya adalah 15 Pekerja Seks. Selanjutnya ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan. Yang pertama adalah proses penjajakan lokasi, kemudian proses seleksi, selanjutnya adalah proses bimbingan sosial dan latihan keterampilan, yang keempat adalah bantuan stimulan dan proses pemantauan secara berkala.” (Wawancara dengan Ratna Wahyuniati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Daerah Kumuh, Dinas Sosial Kabupaten Malang, 25 Juni 2011, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas dijelaskan bahwa pembinaan sosial dan keterampilan dilaksanakan selama 20 hari dengan rincian 5 hari bimbingan teori dan 15 hari pelatihan keterampilan. Dengan peserta ada 15 orang Pekerja Seks yang merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang.

Ada beberapa tahapan dalam kegiatan Program Rehabilitasi Wanita Tuna Susila yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang sebagai berikut:

a. Penjajakan lokasi

Pada proses ini dilakukan pemilihan lokasi yang akan menjadi fokus dan tempat kegiatan. Hal ini dilakukan agar kegiatan bimbingan dan latihan ketrampilan menjadi tepat sasaran. Dari lima lokalisasi di Malang terpilih lokalisasi kebobang. Karena kegiatan rehabilitasi ini dilakukan

secara merata dan bergantian. Kebetulan untuk alokasi anggaran tahun 2011 program rehabilitasi ini bertepatan di Lokalisasi Kebobang Kecamatan Wonosari.

b. Seleksi

Kegiatan ini berupa seleksi dan identifikasi calon peserta yang akan mengikuti bimbingan sosial dan ketrampilan. Dalam tahap seleksi ditentukan 15 Wanita Tuna Susila yang akan mengikuti pembinaan sosial dan ketrampilan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam proses seleksi yang dilakukan Dinas Sosial pemilihan peserta yang akan mengikuti Pembinaan difokuskan pada Pekerja Seks yang berasal dari wilayah Kabupaten Malang.

c. Pembinaan Sosial dan Pembinaan Keterampilan

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pembinaan sosial dan ketrampilan yang diikuti 15 Wanita Tuna Susila yang terdiri dari bimbingan sosial, mental, fisik, dan ketrampilan yang disesuaikan dengan bakat dan minat peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk membina peserta agar dapat merubah cara berfikir yang positif dan produktif serta mempunyai nilai tambah secara ekonomi, bersikap serta bertingkah laku sesuai dengan norma yang ada dan sekaligus memberikan bekal ketrampilan dengan harapan mereka menyadari akan tanggung jawabnya baik terhadap dirinya sendiri dan keluarganya.

Materi yang disampaikan yaitu pemaparan program rehabilitasi, materi-materi keagamaan, kewirausahaan, serta materi tata cara

pernikahan yang disampaikan oleh KUA Kecamatan Wonosari, karena semua dari peserta pembinaan adalah janda dan semuanya ingin hidup normal dan berkeluarga dengan baik.

Selanjutnya pembinaan ketrampilan disesuaikan dengan bakat minat peserta khususnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar, tingkat pendidikan dan kemampuan dari peserta.

Instruktur diisi oleh instansi yang mempunyai keterkaitan yaitu dari Muspika Kecamatan Wonosari baik Kapolsek, Danramil, Camat Wonosari, Dinas Perindustrian/ Perdagangan Kabupaten Malang, Puskesmas, Kantor Urusan Agama Wonosari, lembaga sosial Paramitra dan para Instruktur bersertifikat di bidang kecantikan dan keterampilan sesuai jenis ketrampilan yang diberikan. Metode bimbingan yang dipakai dengan metode ceramah, tanya jawab, pembinaan mental, fisik dan ketrampilan dan praktek ketrampilan.

d. Bantuan stimulan

Bantuan stimulan adalah modal yang diberikan kepada para peserta sehingga mereka akan dapat memulai membuat keterampilan yang kemudian bisa dipasarkan tanpa kebingungan adanya modal usaha. Setiap peserta bimbingan mendapat bantuan stimulus sebesar 950.000,00. Jumlah yang tidak terlalu besar tetapi cukup untuk memulai usaha yang mereka inginkan.

e. Proses Pemantauan

Proses pemantauan ini dilakukan secara berkala dan rutin kepada para Wanita Tuna Susila. Dinas Sosial memantau perkembangan peserta hasil dari kegiatan bimbingan sosial dan latihan ketrampilan.

Tujuan umum dari kegiatan bimbingan sosial dan ketrampilan adalah mencegah dan mengurangi jumlah PMKS khususnya para Wanita Tuna Susila di Wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Malang serta menanamkan kembali rasa harga diri, semangat dan percaya diri serta meningkatnya ketrampilan dan kemauan bekerja untuk dapat mengatasi permasalahan yang menimpa dirinya.

Sehingga mereka dapat hidup secara wajar, positif dan normatif serta produktif di keluarga maupun lingkungan masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan tersebut adalah memotivasi para peserta agar mampu bekerja secara mandiri dan kemudian meninggalkan pekerjaan di masa lalunya. Karena sebagian besar alasan mereka terjun di dunia prostitusi adalah tidak mampunya mereka memenuhi kebutuhan untuk hidup dan minimnya pendidikan dan keterampilan yang mereka dapat.

b. Faktor – faktor Pendukung Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang

Konsep rehabilitasi sesungguhnya ada sebagai upaya untuk membangun manusia agar berkembang secara utuh, dengan tidak memperlakukannya sebagai obyek perencanaan, namun berorientasi pada harapan-harapannya. Sehingga

proses membangun manusia tersebut dilakukan dengan mengembalikan hubungan antar manusia dan manusia dengan lingkungannya.

Sedangkan menurut kamus istilah kesejahteraan sosial, rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembalikan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya. Suatu rehabilitasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan baik dengan dibantu adanya faktor – faktor pendukung. Dalam program rehabilitasi Wanita Tuna susila di Kabupaten Malang terdapat faktor-faktor pendukung baik berasal dari lembaga pemerintahan daerah ataupun dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

“Program rehabilitasi Wanita Tuna Susila di kabupaten Malang dalam tataran implementasinya banyak terdapat faktor-faktor pendukung, yang itu baik dari pemerintah maupun organisasi sosial yang ada, di tahun 2011 ini Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur ikut memberikan dana guna upaya rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang. Selain itu Dinas Perempuan dan bidang Kesejahteraan rakyat Pemerintah Kabupaten juga aktif dalam membina para Wanita Tuna Susila di wilayah Kabupaten Malang, sehingga dinas sosial tidak bekerja sendirian” (Wawancara dengan Ratna Wahyuniati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Daerah Kumuh, Dinas Sosial Kabupaten Malang, 25 Juni 2011, Pukul 10.15 WIB)

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa dengan adanya kerja sama yang baik antar dinas dan bidang di Pemerintahan Kabupaten Malang akan banyak membantu program rehabilitasi. Sehingga dalam lapangan program tersebut akan dapat dijalankan lebih efektif dan terarah. Selain adanya kerja sama yang baik antar pemerintahan dalam proses rehabilitasi ini banyak dibantu oleh lembaga sosial masyarakat yaitu Lembaga Paramitra yang mempunyai fokus di bidang konseling serta pencegahan penyakit HIV AIDS.

“Selain Pemerintah daerah dan Propinsi dalam program rehabilitasi ini kita banyak mendapat bantuan dari Lembaga Sosial Masyarakat yang bergerak di bidang Pencegahan HIV AIDS, yaitu lembaga Paramitra. Lembaga tersebut secara rutin melakukan kegiatan konseling kepada para Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang secara rutin 2 bulan sekali serta melakukan *vicity* yaitu pengecekan darah gratis untuk para orang-orang risti (resiko tinggi) di sekitar lokasi untuk mengetahui penularan virus HIV AIDS” (Wawancara dengan Ratna Wahyuniati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Daerah Kumuh, Dinas Sosial Kabupaten Malang, 25 Juni 2011, Pukul 10.15 WIB)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi Wanita Tuna Susila di wilayah Kabupaten Malang tidak hanya tugas daripada Pemerintah daerah baik Dinas Sosial, Dinas Perempuan ataupun bidang Kesejahteraan Rakyat. Tetapi rehabilitasi ini merupakan program bersama yang melibatkan sektor LSM yang berperan aktif dalam kegiatan konseling dan pengecekan darah yang dilakukan secara rutin kepada para risti (resiko tinggi) di wilayah lokasi.

Faktor Pendukung selanjutnya adalah berasal dari Wanita Tuna Susila itu sendiri. Mereka sangat merasa diperhatikan atas minimnya keterampilan yang mereka miliki, selain itu mereka saat ini merasa memiliki banyak wacana-wacana baru terkait masalah kesehatan, pentingnya memakai kondom, tata cara pengurusan pernikahan yang sah. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Pekerja Seks yang berda di lokasi Kebobang.

“Dengan bantuan pembinaan ini saya ngrasa banyak manfaatnya mas, maka dari itu saya dan teman-teman merasa semangat untuk mengikuti program yang ada. Selain itu kita semua sudah sepakat selama ada program dari Dinas Sosial kemarin kita tidak menerima tamu di pagi hari, dan apabila ada peserta yang masih menerima tamu pada waktu itu kami juluki pengkhianat.” (Wawancara dengan Tini(nama samaran), Pekerja Seks di lokasi Kebobang, 5 Juli 2011, pukul 10.30)

Dari wawancara di atas menunjukkan adanya semangat dan respon yang positif dari para peserta rehabilitasi bahkan mereka sudah sepakat akan menjuluki temannya pengkhianat apabila meninggalkan program rehabilitasi yang sudah diberikan. Dengan begitu tujuan yang diinginkan akan semakin mudah dalam tataran pencapaiannya. Dan faktor pendukung yang terakhir adalah birokrat desa setempat yaitu kepala desa Kebobang yang selalu perhatian dan aktif dalam usaha pemberdayaan Wanita Tuna Susila di desa Kebobang.

“Untuk penanganan Pekerja Seks ini, saya sering berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk minta difasilitasi dalam pemberdayaannya dan hasilnya banyak sekali pemerintah yang memberikan bantuan pembinaan, keterampilan dan bahkan pemodalan kepada para penghuni lokalisasi Kebobang, dan untuk program dari Dinas Sosial ini saya sangat apresiet karena banyak membantu warga saya untuk mau berubah dan kemudian mandiri dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya.” (Wawancara dengan Mujiati, Kepala Desa Kebobang, 27 Juni 2011, pukul 10.30)

Dari semua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kerja sama yang baik dengan semua sektor baik pemerintah, LSM dan Pekerja Seks akan berdampak sangat positif yaitu semua program rehabilitasi tersebut akan berjalan dengan efektif dan juga dapat dirasakan dampaknya suatu saat nanti. Selain steak holder di atas harapannya pemerintah desa mampu merangkul para pengusaha untuk membantu pemodalan dan pematangan keterampilan yang dimiliki oleh para Wanita Tuna Susila di lokalisasi Kebobang.

Jika kedepannya sektor privat sudah dapat ikut andil secara aktif dalam pemberdayaan Wanita Tuna Susila maka akan semakin memudahkan pemerintah daerah dalam usaha pemberdayaan yang mereka lakukan selama ini. Karena kerja sama antar tiga sektor yaitu pemerintah, LSM dan privat sangatlah efektif dalam penanganan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan *good governance*.

c. Faktor – faktor Penghambat Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang

Dalam program rehabilitasi Wanita Tuna Susila dibutuhkan suatu konsenterasi yang serius dan sebuah konsistensi, karena permasalahan tersebut merupakan masalah yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu yang singkat dan dengan biaya yang sedikit. Upaya rehabilitasi Wanita Tuna Susila oleh Dinas Sosial dalam tataran aplikasinya ditemukan beberapa hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil yang ingin dicapai.

Faktor penghambat pertama adalah minimnya alokasi dana dari pemerintah Kabupaten Malang, hal ini menyebabkan pengajuan proposal Dinas Sosial Kabupaten kepada Dinas Sosial Propinsi.

“Program rehabilitasi yang dilakukan di lokalisasi kebobang kemarin banyak mendapat suntikan dana dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, jika hanya mengandalkan alokasi dana dari Kabupaten maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan. Karena dalam kegiatan tersebut sekaligus diberikan modal usaha kepada para Wanita Tuna Susila yang ada agar mau merintis usaha dari pembinaan keterampilan yang sudah kita fasilitasi dan sebab itu juga yang membuat mereka aktif dan apresiet akan program yang kita berikan kemarin.” (Wawancara dengan Ratna Wahyuniati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Daerah Kumuh, Dinas Sosial Kabupaten Malang, 25 Juni 2011, Pukul 11.15 WIB)

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa minimnya alokasi dana dari pemerintah kabupaten merupakan hambatan program rehabilitasi sosial bagi Wanita Tuna Susila, dan karena sebab itulah meyebabkan hasil dari program rehabilitasi yang terdahulu kurang berdampak secara efektif. Faktor penghambat selanjutnya adalah tidak adanya panti khusus untuk penampungan eks. WTS di wilayah Kabupaten Malang.

Panti khusus rehabilitasi sangatlah dibutuhkan bagi para WTS ataupun eks. Wanita Tuna Susila karena di dalam Panti tersebut penanganan lebih terfokus dan konsisten. Dengan belum adanya panti tersebut tidak sedikit para Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang setelah mendapatkan program rehabilitasi kembali lagi ke dalam kegiatan prostitusi karena pemantauan yang dilakukan Dinas Sosial juga belum dapat rutin dan konsisten.

“Di Propinsi Jawa Timur hanya terdapat satu panti khusus untuk rehabilitasi sosial yaitu Panti Karya Wanita Ngudi Rahayu yang bertempat di Kabupaten Blitar, Panti Karya Wanita Ngudi Rahayu secara teknis mempunyai fungsi membantu merubah sikap dan perilaku psikologis dengan cara pendekatan, konsultasi, rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi wanita bermasalah. Selain itu panti Ngudi Rahayu menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita, memulihkan kembali harga diri, tanggung jawab sosial, kemauan dan kemampuan para wanita agar dapat merasakan hidup wajar dalam masyarakat.” (Wawancara dengan Ratna Wahyuniati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Daerah Kumuh, Dinas Sosial Kabupaten Malang, 25 Juni 2011, Pukul 11.15 WIB)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Panti Sosial khusus untuk Wanita Tuna Susila ataupun eks. WTS sangat diperlukan untuk merubah kembali pola pikir dan kebiasaan para Wanita Tuna Susila sehingga ketika mereka terjun atau kembali ke masyarakat mereka dapat dengan mudah beradaptasi dan mampu bekerja dengan kemampuan yang mereka miliki. Hambatan rehabilitasi bagi Wanita Tuna Susila yang selanjutnya adalah rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh para Wanita Tuna Susila, artinya ketika mereka memiliki pendidikan rendah berarti mereka juga akan sulit untuk bersaing mendapatkan pekerjaan ketika mereka sudah meninggalkan tempat lokalisasi nanti

Hal ini yang kemudian menjadi tugas oleh Pemerintah untuk benar-benar melakukan pemantauan dengan efektif dan rutin karena ketika mereka tidak ada proses pendampingan secara konsisten maka mereka sangat mungkin kembali ke tempat prostitusi ketika mereka kesulitan di dunia luar atau kehisupan masyarakat. Dengan adanya pelatihan keterampilan dan modal usaha bagi mereka akan memudahkan para Wanita Tuna Susila tersebut mempunyai modal untuk mandiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Faktor penghambat terakhir adalah pada penutupan Lokalisasi Buk Tape di Kecamatan Kepanjen pada akhir tahun 2010. Hal ini berdampak pada eksistensi penghuni lokalisasi tersebut datang dan pergi ke lokalisasi yang masih ada termasuk Lokalisasi Kebobang. Pada waktu itu penutupan Lokalisasi Buk Tape tidak diikuti dengan pengawalan dan pengawasan secara baik kepada para mucikari dan Pekerja Seks yang ada sehingga meski sudah ditutup tetapi mereka tetap bekerja dilokalisasi yang masih ada.

6. Dampak Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang

Pada dasarnya di dunia ini tidak ada wanita yang ingin menjadi seorang Tuna Susila untuk menopang kebutuhan hidupnya tetapi keadaan ekonomi yang kemudian memaksa mereka terjun ke dunia tersebut. Berdasarkan hasil penelitian banyak dari mereka juga mempunyai pendidikan yang rendah ditambah minimnya keterampilan yang dimiliki, berangkat dari masalah itulah hanya dengan menjual diri jalan yang dapat mereka tempuh.

Kegiatan Pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial banyak dirasa membantu oleh beberapa Pekerja Seks di Lokalisasi Kebobang. Baik dari peningkatan pengetahuan dan peningkatan keterampilan.

a. Peningkatan pengetahuan

Dampak rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial dari aspek wawasan sangat bermanfaat, karena dalam proses rehabilitasi tersebut Dinas Sosial mendatangkan beberapa ahli di bidang agama dan kesehatan yaitu dari Puskesmas Wonosari dan KUA Wonosari untuk memberikan pengarahan dan ceramah untuk memberikan wawasan baru kepada para peserta pembinaan.

“Pelatihan kemarin ya banyak membantu saya mas, mulai diberikan ceramah masalah kesehatan dari Puskesmas sehingga kita tahu bagaimana mengurus Jamkesmas serta kemarin juga ada pengarahan dari KUA yang banyak membantu kita untuk mengetahui tata cara pengurusan pernikahan yang sah secara hukum, (Wawancara dengan Susi(nama samaran), Pekerja Seks di Lokalisasi Kebobang, 5 Juli 2011 pukul 09.30)

Dari pendapat seorang PS di atas, pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial banyak membantu untuk peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Pekerja Seks itu sendiri tentang masalah kesehatan yaitu, tata cara pernikahan yang sah sesuai hukum, dan pemberian wacana-wacana kesehatan termasuk penjelasan pengurusan kartu Jamkesmas.

b. Peningkatan Keterampilan dan bantuan modal

Selain mendapatkan wacana-wacana para peserta pembinaan juga mendapatkan pelatihan-pelatihan keterampilan dan mendapat bantuan pemodalanan sehingga ketika mereka sudah keluar dari lokalisasi mereka pun tidak kebingungan mencari pinjaman.

“Dalam pembinaan kemarin kita mendapat banyak pelatihan keterampilan membuat pernik-pernik toples, nyalon yang sebelumnya saya ndak tau apa apa masalah begini. Selain itu setelah pelatihan 20 hari kemarin kita mendapat uang untuk modal usaha sebesar 950.000,00.” (Wawancara dengan Ana (nama samaran), Pekerja Seks di Lokalisasi Kebobang, 5 Juli 2011 pukul 10.30)

Dalam pendampingan pelatihan keterampilan Dinas Sosial mempunyai strategi untuk merintis usaha para peserta binaan, yaitu dengan membuat kelompok usaha bersama yang dalam tataran teknisnya para paserta pembinaan dibuatkan kelompok-kelompok untuk memulai usaha mereka. Untuk tata cara pemasaran para peserta pembinaan dapat memasarkan kerajinan toplesnya dengan menawarkan kepada tetangga-tetangga. Karena permintaan toples pada waktu sebelum Hari Raya Idul Fitri meningkat.

“Nantinya kita berencana membawa hasil kerajinan ini waktu kita pada pulang kampung, kan nanti sebelum puasa kita semua sudah tidak boleh di sini jadi pada waktu pulang sekalian saya bawa hiasan toplesnya juga, sapa tau nanti banyak yang pesan mas kan kebetulan mau Hari Raya jadi pasti banyak nanti.” (wawancara dengan Ana(nama samaran), Pekerja Seks di Lokalisasi Kebobang, 5 Juli 2011, pukul 10.30)

Selain itu untuk terus melatih kemampuan keterampilan para peserta pembinaan, Dinas Sosial mempunyai cara yaitu mendirikan salon potong rambut disalah satu rumah pengurus Pokja. Sehingga meskipun kegiatan program pembinaan sudah selesai para peserta pembinaan dapat terus melatih kemampuannya untuk memotong rambut dan *crembath*.

“Nantinya kita akan mengusahakan memberikan fasilitas kepada mereka dengan memberikan peralatan salon, sehingga mereka dapat belajar mencuci rambut, *creambath* dan syukur-syukur para tamu mau mencoba sehingga lumayan bisa menambah penghasilan.” (wawancara dengan Ibu Pawening, Kabid Rehabilitasi Sosial, 24 Juni 2011)

B. PEMBAHASAN

1. Strategi Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang

Masalah sosial tentang kegiatan prostitusi dalam masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Karena prostitusi akan terus ada dan berkembang selama permintaan masih ada. Ditambah kebutuhan manusia pada saat sekarang ini semakin kompleks tetapi kebanyakan daripada mereka merasa kesulitan untuk mencapainya karena minimnya pendidikan dan keahlian maka jalan satu-satunya hanyalah menjual apa yang dia miliki.

Untuk mengatasi permasalahan prostitusi tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak hanya dengan suatu SK atau Perda kegiatan prostitusi dapat dihentikan. Karena para Wanita Tuna Susila terjun ke dunia tersebut kebanyakan dikarenakan permasalahan hidup dan kebutuhan. Jika pemerintah hanya mengeluarkan peraturan untuk penutupan lokalisasi tanpa juga memberikan pelatihan kepada mereka maka peningkatan pengangguran yang akan terjadi.

Untuk mengatasi masalah prostitusi Pemerintah Kabupaten Malang melakukan sebuah strategi tentang rehabilitasi Wanita Tuna Susila sebagaimana di

ungkapkan Aquinas 1999:5, rehabilitasi merupakan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna. Menjadi manusia berguna disini dapat diartikan hidup sedemikian rupa sehingga Ia dapat berkembang, dapat membangun dan menemukan identitasnya, dapat menjadi bahagia. Hal tersebut sangatlah searah dengan keadaan yang ada di satu sisi kebanyakan dari Wanita Tuna Susila tidak mempunyai pendidikan dan keahlian yang baik dan kemudian mampu bersaing untuk itu perlu adanya suatu perbaikan yaitu dengan pembinaan moral dan pembinaan keterampilan sehingga harapannya mereka mampu menjadi manusia yang mandiri dan berguna minimal untuk dirinya sendiri dan selebihnya untuk masyarakat.

Konsep rehabilitasi tidak hanya berfokus kepada pembinaan dan pelatihan keterampilan semata tetapi program rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial tersebut menekankan dua fokus yaitu pembinaan moral atau sosial dan pembinaan keterampilan. Pembinaan moral dan budi pekerti merupakan pembinaan yang sangat baik, dan merupakan suatu pembinaan dasar yang utama bagi seluruh makhluk dalam masyarakat. Pembinaan moral dan budi pekerti untuk melatih perbuatan, ucapan, dan pikiran agar selalu benar. Bertujuan agar kita selalu berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari sesuatu yang sudah dilarang.

Didalam pembinaan moral, para Wanita Tuna Susila ditekankan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Agama. Sebagai contoh dalam pembinaan moral, mereka dilarang untuk mencuri, membunuh, makan makanan haram, dsb. Dan harapannya dengan adanya program pembinaan ini mereka akan memiliki Kesadaran Sejati, kesadaran yang muncul dari dalam hatinya. Ketika

kesadaran sejati tersebut sudah muncul dalam diri mereka, seberat apapun godaan yang datang baik dari godaan uang dan nafsu akan dapat mereka tolak.

Setelah mendapatkan pembinaan moral selanjutnya para Wanita Tuna Susila mendapatkan pelatihan keterampilan-keterampilan yang diberikan para instruktur. Dengan keterampilan yang mereka miliki harapannya para Wanita Tuna Susila akan dapat memiliki mata pencaharian yang akan menopang kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para WTS bahwa sebagian besar dari mereka terjun ke dunia prostitusi dikarenakan oleh tuntutan akan ekonomi.

Kegagalan para Wanita Tuna Susila untuk hidup normal lebih disebabkan karena mereka tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang mampu bersaing sehingga mereka sangat sulit untuk meninggalkan dunia prostitusi yang sudah mereka lakukan. Artinya keadaan yang dialami para Wanita Tuna Susila merupakan suatu keadaan ketidakberdayaan. Sennet dan Cabb serta Conway mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakberdayaan masyarakat ekonomi lemah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ketiadaan jaminan ekonomi
- b. Ketiadaan pengalaman dalam arena politik
- c. Ketiadaan akses terhadap informasi
- d. Ketiadaan dukungan finansial
- e. Ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan
- f. Adanya ketegangan fisik maupun emosional (Suharto, 2005:61)

Menurut Sannet faktor kurangnya dukungan finansial dan ketiadaan pelatihan-pelatihan akan menyebabkan seseorang berada dalam keadaan ekonomi lemah. Dan ketika ekonomi seseorang sudah lemah maka mereka akan cenderung melakukan apa saja untuk mencapai tuntutan kebutuhan. Maka dari itu Dinas Sosial Kabupaten Malang melakukan sebuah pembinaan moral dan pelatihan keterampilan kepada para Wanita Tuna Susila guna proses pembentukan moral yang baik serta meningkatkan keahlian yang kemudian hal tersebut dapat digunakan untuk modal mendapat pekerjaan yang layak.

Semua program yang dilakukan Dinas Sosial di atas merupakan suatu bentuk daripada pemberdayaan masyarakat. Dimana pemberdayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang bercirikan ketidakberdayaan. Dengan pendekatan pemberdayaan ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan non material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses belajar, sehingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian, dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan keamanan secara terus-menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Adapun tahap-tahap pemberdayaan masyarakat seperti diungkap oleh Sulistiyani (2004: 83), adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, dimana pihak pemberdayaan/ aktor perilaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan ketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian masyarakat dalam bentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi di dalam lingkungannya. Pada tahap ini

masyarakat akan mandiri dalam melakukan pembangunan. Pemerintah hanya sebagai fasilitator saja.

Berdasarkan teori tentang tahap-tahap pemberdayaan masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang yaitu program rehabilitasi sosial juga melewati ketiga tahap pemberdayaan masyarakat seperti yang dikemukakan di atas. Pertama para Wanita Tuna Susila diberikan ceramah agar dapat merubah mindset mereka dengan mau kembali ke masyarakat dan hidup normal dengan bekal keterampilan yang mereka miliki, selanjutnya proses pelatihan keterampilan itu sendiri sebagai modal merintis usaha baru dan kemudian dapat hidup di masyarakat dan yang terakhir yaitu tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu;

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada

masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*Protectly*)

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi semakin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Berdasarkan dengan teori model-model pemberdayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Wanita Tuna Susila yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang termasuk dalam usaha memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Hal ini dibuktikan dengan adanya rehabilitasi sosial melalui kegiatan pembinaan sosial dan pelatihan ketrampilan.

Dalam kegiatan tersebut, WTS diupayakan untuk mendapatkan pengetahuan yang nantinya digunakan untuk kehidupan bermasyarakat. Selain itu dalam program rehabilitasi tersebut para Wanita Tuna Susila juga mendapatkan bantuan pemodalannya untuk merintis usaha yang akan mereka lakukan dengan begitu mereka tidak akan kesulitan mencari modal. Dan langkah yang terakhir

pemerintah juga melakukan suatu pemantauan hal tersebut merupakan bentuk daripada kegiatan melindungi bukan mengisolasi para Wanita Tuna Susila yang ada di Kabupaten Malang.

2. Faktor – Faktor Pendukung Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang

Dari hasil penelitian yang diperoleh lancarnya program rehabilitasi Wanita Tuna susila di Lokalisasi Kebobang kunci utamanya dikarenakan adanya suatu komunikasi dan kerjasama dengan baik antar lini yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang. Seperti dikemukakan Kartasmita (1997:15), pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek di antaranya dapat diketengahkan sebagai berikut :

1. Peranan pemerintah teramat penting. Berarti birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi dan visi.

Sebagaimana visi dari Dinas Sosial Kabupaten Malang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui usaha bersama pemerintah dan masyarakat. Dengan program rehabilitasi yang dilakukan berarti Dinas Sosial berupaya untuk mencapai visi tersebut yaitu terwujudnya keadaan masyarakat yang sejahtera. Dalam prosesnya Dinas Sosial Kabupaten tidak berjalan sendiri melainkan dalam program tersebut terdapat kerjasama yang baik dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan begitu target pencapaian visi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah tercapai.

2. Organisasi-Organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat sendiri. Disini yang mempunyai fungsi dan peran yang besar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat, (LSM) dalam membantu peran pemerintah.

Dalam program rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang peran Lembaga Swadaya Masyarakat juga sangat andil dalam berperan. LSM tersebut yaitu lembaga Paramitra yang mempunyai fungsi sebagai mitra Dinas Sosial Kabupaten Malang yang berperan Aktif dalam proses pengawasan kesehatan khususnya pemantauan penularan Infeksi Menular Seksual dan pemantauan virus HIV AIDS dengan melakukan *vicity* yang dilakukan kepada para Wanita Tuna Susila di lokalisasi tersebut.

Lembaga Paramitra juga berperan sebagai lembaga konseling untuk penghuni Lokalisasi Kebobang, sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang menyimpannya. Selain itu lembaga tersebut mempunyai tugas memberikan penguatan pengetahuan, sikap dan perubahan perilaku pada remaja, perempuan, laki-laki, keluarga serta masyarakat umum.

3. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri atau yang sering di sebut local community organizationt. Lembaga ini dapat bersifat semi atau kulisi, seperti LKMD, PKK, Babinsa, atau Karang Taruna, Atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok sinoman, dan segainya.

Peran lembaga Kemasyarakatan di wilayah Desa Kebobang juga cukup baik meskipun belum satu frame dengan visi Dinas Sosial. Peran lembaga di atas salah satunya adanya pengawasan bersama akan ketertiban yang ada di dalam lokalisasi sebagai contoh setiap pukul 22.00 lembaga di atas melakukan pengawasan keliling ke setiap wisma yang ada untuk memastikan bahwa semua wisma yang ada di Lokalisasi Kebobang sudah tutup karena peraturan yang ada dalam lokalisasi tersebut yaitu mewajibkan seluruh wisma tutup paling lambat pukul 22.00 demi menjaga ketertiban dan keamanan desa Kebobang.

Selain itu sebagai bentuk tanggung jawab akan kesehatan bersama setiap hari Jumat Pagi diadakan senam pagi yang dipandu dan dipimpin oleh Babinsa, hal tersebut dilakukan agar tercipta suatu kesehatan bersama antar penghuni Lokalisasi Kebobang dan lembaga keamanan yang berada dalam Desa Kebobang.

4. Koperasi, merupakan wadah ekonomi rakyat yang secara khusus di nyatakan dalam kontitusi yang paling sesuai untuk membangun ekonomi.

Sejauh ini peran koperasi untuk memberdayakan para Wanita Tuna Susila agar mau merintis kerampilan yang mereka miliki belum terlihat dan belum berperan dengan baik. Dalam proses program rehabilitasi tersebut Dinas Sosial sudah memberikan dana stimulan sebesar 950.000,00 tetapi dilain sisi sangat diperlukan adanya kerja sama yang baik dengan koperasi yang ada. Sehingga para Wanita Tuna Susila akan lebih mudah mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Harapan kedepan Dinas Sosial mampu merangkul koperasi sebagai mitra kerja, dengan adanya kerjasama yang baik dengan koperasi yang ada, koperasi tersebut dapat memberikan bantuan stimulan dengan bunga yang rendah yang tidak memberatkan para pelaku usaha baru, sehingga mereka akan lebih mudah dalam proses pemasaran atau usaha untuk mengembangkan produksi yang telah dia lakukan.

5. Pemberdayaan masyarakat harus dicerminkan dalam proses perencanaan pembangunan Nasional

Mekanisme di atas menekankan adanya suatu program pemberdayaan yang bersifat menyeluruh sehingga visi yang ingin dicapai akan lebih mudah tercapai. Untuk program rehabilitasi di tahun 2011 hanya dilakukan di Lokalisasi Kebobang dan belum mampu menjangkau lokalisasi yang lain di Kabupaten Malang. Hal ini terjadi karena minimnya dana yang sudah direncanakan sehingga belum mampu menjangkau secara masif.

Kurang meratanya program yang diberikan dapat menyebabkan kurang efektifnya program rehabilitasi ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa arus keluar masuknya Wanita Tuna Susila dari lokalisasi ke lokalisasi lain sangat padat jadi contohnya ketika WTS di Lokalisasi Kebobang diberikan program rehabilitasi dan kemudian mau pulang untuk berwirausaha tetapi karena arus yang padat tadi ada Wanita Tuna Susila baru yang masuk ke Lokalisasi Kebobang. Jadi kalau kita memandang dari segi kuantitas seolah-olah program rehabilitasi tersebut belum mampu mengurangi jumlah penghuni di dalam lokalisasi tersebut.

6. Pendamping. Penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator.

Di Lokalisasi Kebobang sampai sekarang ini belum ada pendamping khusus untuk memberdayakan penghuni lokalisasi dalam melakukan wirausaha. Pendampingan yang terjadi hanya pendamping dalam hal pengawasan kesehatan, pendampingan ini dilakukan oleh lembaga Paramitra yang di bantu oleh pengurus Pokja setempat.

Pendampingan ini mempunyai peran yaitu sebagai media pemantauan kesehatan para penghuni lokalisasi baik mucikari ataupun Wanita Tuna Susila yang ada terhadap penularan penyakit Infeksi Menular Seksual ataupun penularan virus HIV AIDS.

7. Keikutsertaan masyarakat yang lebih mampu, khususnya dunia usaha dan swasta. Pemberdayaan masyarakat dapat lebih optimal jika terjadi keterkaitan dalam kemitraan usaha diantara yang telah mampu dengan yang masih tertinggal terutama melalui penyediaan modal usaha.

Sinergitas antara *privat* sektor sangatlah baik dan menguntungkan untuk mengembangkan suatu usaha. Sejauh ini dalam proses pemberdayaan Wanita

Tuna Susila belum ada sinergitas yang baik dengan para pemodal hal ini terjadi karena kurangnya akses yang belum dibuka oleh pemerintah. Dalam pemberdayaan masyarakat sinergitas 3 sektor yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta sangatlah dibutuhkan karena dalam usaha tersebut dibutuhkan suatu ikatan yang kuat agar mampu menyelesaikan keterbatasan yang ada baik keterbatasan pemodalan, keterbatasan keterampilan dan lain sebagainya.

3. Faktor – Faktor Penghambat Rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil penelitian upaya rehabilitasi Wanita Tuna Susila oleh Dinas Sosial dalam tataran aplikasinya ditemukan beberapa hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil yang ingin dicapai. Hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Minimnya alokasi dana dari pemerintah Kabupaten Malang.
2. Belum adanya panti rehabilitasi bagi Wanita Tuna Susila dan ex. Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang.
3. Kurang maksimalnya koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat
4. Belum adanya suatu bantuan pemodalan dari koperasi atau sektor swasta
5. belum meratanya program rehabilitasi ke semua lokalisasi yang ada di Kabupaten Malang

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan tentunya juga mengandung kelemahan atau resiko kegagalan. Prasojo (2004:11) menyebutkan terdapat 6 permasalahan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Diskontinuitas dan diskoordinasi, yaitu keseluruhan program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tidak dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan secara sporadis. Kebijakan pemerintah malah berseberangan dengan pendampingan LSM. Orientasi program yang dilaksanakan pemerintah, pada satu sisi menampakkan hasil nyata namun pada sisi yang lain terkadang tidak menyentuh akar permasalahan yang ada.

Fenomena yang terjadi dalam rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang di satu sisi sudah baik tetapi ada beberapa hal kekurangan, khususnya terkait masalah perbedaan visi dan misi antara Pemerintah Kabupaten yaitu Dinas Sosial dengan Lembaga Paramitra. Dinas Sosial Kabupaten mempunyai keinginan dengan adanya program rehabilitasi tersebut para Wanita Tuna Susila dapat merubah mindset atau cara berpikirmnya agar hidup normal dan kembali di masyarakat tetapi Lembaga Paramitra lebih mendampingi para penghuni lokalisasi dari sisi pengawasan kesehatan tentang penularan penyakit HIV/AIDS

Melihat realita di atas kedua institusi pemerintah dan sosial tersebut sudah sama-sama bekerja dengan baik, tetapi dalam tataran implementasinya masih sangat minim koordinasi satu dengan yang lainnya. Sehingga dampaknya capaian untuk mewujudkan kehidupan Wanita Tuna Susila yang dapat hidup dengan wajar kurang efektif.

- b. Disinformasi program, yaitu pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan bantuan para konsultan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat atau lembaga pelaksana dari pemberdayaan masyarakat.

Sejauh ini semua program yang diberikan Dinas Sosila kepada Para Wanita Tuna Susila dapat diterima dengan baik. Berdasarkan penelitian banyak dari peserta pembinaan yang merasa senang dan banyak menerima manfaatnya dari program bimbingan tersebut. Jadi faktor di atas tidak berlaku dalam proses pembinaan sosial Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kebobang Kabupaten Malang.

- c. Diorientasi, yaitu, pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses biasanya membutuhkan waktu yang lama. Banyaknya masalah baru yang muncul, disertai pula oleh hasil yang belum tampak nyata terkadang menjadikan fasilitator (pendamping), baik dari pemerintah atau LSM, mengubah kebijakan yang lebih nyata. Pergeseran pendekatan, dari proses ke hasil bukanlah solusi. Langkah sinergis yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan menyelaraskan kedua pendekatan tersebut.

Menurut Prasajo untuk mengefektifkan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan penyelarasan pendekatan yaitu pendekatan yang sudah dijalankan dengan pendekatan yang lebih nyata. Permasalahan kurang efektifnya Penanggulangan Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang salah satu faktornya

adalah belum adanya panti khusus untuk merehabilitasi Wanita Tuna Susila tersebut sehingga meskipun program dari Pemerintah terkait sudah berjalan tetapi pengawasan yang dilakukan juga belum mampu maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan di atas hendaknya Pemerintah Kabupaten Malang membangun suatu panti rehabilitasi khusus untuk penampungan sekaligus pembinaan kepada para Wanita Tuna Susila ataupun ex. Wanita Tuna Susila, dengan begitu lemahnya pengawasan yang terjadi mampu di tangani dengan baik dan efektif.

d. Generalisasi, yaitu deferensiasi sosial, politik, dan budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Dengan kondisi yang majemuk tersebut maka pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya pembangunan yang tidak bersifat monolitik, namun haruslah bersifat dinamis dengan memperhatikan nilai-nilai dasar di masyarakat, karakter budaya, serta struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan teori yang diungkapkan prasojo hendaknya suatu pemberdayaan bersifat dinamis dan melibatkan semua struktur di masyarakat. Untuk program rehabilitasi terhadap Wanita Tuna Susila ini sudah banyak melibatkan birokrat di lapisan masyarakat baik dari Kepala Desa, Babinsa, dan Puskesmas. Tetapi koordinasi diantaranya hanya bersifat reaktif jadi ketika ada suatu program baru institusi-institusi di atas melakukan koordinasi.

Selain itu hendaknya program pembinaan tersebut harus menekankan pendekatan sosial yang bersifat dinamis dengan merangkul tokoh-tokoh

masyarakat serta pemuka agama untuk memberikan pandangannya tentang pembinaan moral yang dilakukan secara rutin dan dinamis sehingga dengan begitu ada bentuk respon masyarakat secara utuh dan maksimal.

e. Rentang Birokrasi dan tingginya biaya operasional, yaitu berbagai peraturan hukum dan Undang-undang pembangunan dan pemberdayaan yang bersifat kaku yang hanya didasarkan pada Surat Keputusan (SK), Petunjuk Pelaksana (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) juga sistem penganggaran yang sering menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini menyebabkan sulitnya petugas lapangan berhadapan dengan kenyataan yang membutuhkan fleksibilitas. Akibatnya tujuan pemberdayaan masyarakat sulit dicapai karena orientasi petugas lebih kepada peraturan daripada menjawab kebutuhan lapangan.

Karena permasalahan minimnya sumber daya keuangan program pembinaan ini belum mampu dilaksanakan secara komperhensif kesemua lokalisasi di wilayah Kabupaten Malang, serta pengawasan setelah program pembinaan tersebut belum mampu dilaksanakan dengan maksimal karena semuanya terbentur permasalahan sumber daya yang ada yaitu sumber daya pendanaan ataupun sumber daya manusia.

BAB V

PENUTUP

Mengakhiri penelitian ini dapat diajukan kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan dalam rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang.

A. Kesimpulan

Program Pembinaan Sosial dan pelatihan bagi Wanita Tuna Susila oleh Dinas Sosial merupakan suatu bentuk daripada pemberdayaan masyarakat. Dimana pemberdayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang bercirikan ketidakberdayaan. Dengan pendekatan pemberdayaan ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan non material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Pembinaan moral dan pelatihan keterampilan merupakan suatu strategi rehabilitasi yang efektif karena dengan upaya merehabilitasi dan membekali para Wanita Tuna Susila dengan bekal keterampilan maka akan meminimalisir dampak pengangguran yang terjadi apabila suatu saat pemerintah melakukan kebijakan tegas dalam penutupan lokalisasi di wilayah Kabupaten Malang. Upaya tersebut sangat solutif dikarenakan berdasarkan hasil wawancara kebanyakan alasan para Wanita Tuna Susila terjun ke dunia prostitusi adalah

1. Minimnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki
2. Tuntutan akan kebutuhan hidup

3. Permasalahan keluarga

Dengan adanya program pembinaan sosial oleh Dinas Sosial harapannya para Wanita Tuna Susila mampu kembali menata kehidupannya dengan baik dengan kembali ke masyarakat dengan membawa bekal yang mereka dapatkan dalam pembinaan sosial dan program pelatihan yang sudah diberikan. Adapun dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam tataran implementasinya, faktor-faktor tersebut adalah

Faktor Pendukung

1. Koordinasi sektoral yang baik dalam internal pemerintah dalam tataran propinsi, kabupaten, kecamatan sampai birokrat desa.
2. Adanya peran Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Respon positif dan semangat dari para Wanita Tuna Susila untuk ingin berubah.

Faktor Penghambat

1. Minimnya alokasi dana dari pemerintah.
2. Belum adanya panti rehabilitasi bagi Wanita Tuna Susila dan ex. Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang.
3. Kurang maksimalnya koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.
4. Belum ada koordinasi yang baik dengan koperasi atau sektor swasta khususnya dalam hal pemodalan dan penyediaan lapangan pekerjaan.

5. Belum meratanya program rehabilitasi ke semua lokalisasi yang ada di Kabupaten Malang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis menyarankan:

1. Pemerintah harus bersifat tegas dengan kebijakan yang sudah ada.
2. Peningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta, agar dengan adanya sinergitas yang baik dari ketiga sektor tersebut pencapaian pemberdayaan masyarakat yang efektif dapat terealisasi.
3. Menambah alokasi anggaran program rehabilitasi Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang, agar program tersebut dapat dilaksanakan di seluruh lokalisasi yang ada di wilayah Kabupaten Malang.
4. Mendirikan panti rehabilitasi sosial di Kabupaten Malang yang berfungsi untuk tempat singgah dan rehabilitasi secara khusus bagi para Wanita Tuna Susila maupun ex. Wanita Tuna Susila di Kabupaten Malang agar pengawasan dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
5. Berupaya melakukan kerjasama dengan menggandeng para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berperan aktif dalam program pembinaan moral bagi para Wanita Tuna Susila.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, A. James & Dean, J. Champion. 1992. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Eresco.
- Beilharz, Peter. 2005. *Teori-Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Burhan, Bungin. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chaney, David. 2009. *Lifestyles Sebuah Pengantar komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1995, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang. Karya Toha Putra
- E M Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher.
- G. Kartasapoetra L. J. B. Kreimers, 1987, *Sosiologi Umum*, Jakarta: Bina Aksara
- Isbani, Syam & Ravik Karsidi. 1990. *Rehabilitasi Anak Luar Biasa*. Surakarta: UNS Press.
- Kartasmita. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Vol.9
- Kartasmita. 1996. *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*.
- Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Koentjaraningrat dan A.A. Loendin, 1995, *Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan Kesehatan*, Jakarta: Gramedia.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Matthew, Miles. B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- _____. 1999. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soedjono. 1982. *Pathologi Sosial*. Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono. 1985. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Rajawali.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Sulistyaningsih, endang & Yudo Swasono, 1993, *The Sexs Industry, Prostitution and Development in Indonesia*, Bangkok : Universitas Mahidol

Sumarnonugroho, T. 1991. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Hanindita

Sutarto Hadi & Bambang Wicaksono Triantoro, 2001, *Pembinaan Wanita Pekerja Seks Komersial Pasca Penutupan Lokalisasi*, Yogyakarta : PPPK UGM

Sutopo, H.B. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Syam, Nur. 2011. *Agama Pelacur*. Jogjakarta : Lkis

Winarni, Isti. 2008. *Upaya Mantan Wanita Tuna Susila dalam Menghapus Label Negatif di Masyarakat*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*

<http://www.bps.go.id/> 2011

Lampiran

Foto-foto Program Pembinaan Sosial dan Pelatihan Keterampilan

